

**IMPLEMENTASI NILAI-NILAI DEMOKRASI DALAM PEMBELAJARAN
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
DI SMP USDATARA KOTA SORONG**

SKRIPSI



Oleh

RUCE SANGKEK

148720521015

**PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS PENDIDIKAN BAHASA, SOSIAL, DAN OLAAHRAGA
UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH (UNIMUDA) SORONG
TAHUN 2025**

**IMPLEMENTASI NILAI-NILAI DEMOKRASI DALAM PEMBELAJARAN
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
DI SMP USDATARA KOTA SORONG**

Skripsi

Untuk memperoleh derajat gelar sarjana pada Universitas Pendidikan
Muhammadiyah Sorong (UNIMUDA)

Di pertahankan dalam ujian Skripsi

pada Tanggal.....

Oleh

Ruce Sangkek

Lahir

Tofoi 20 April 2003

HALAMAN PERSETUJUAN
IMPLEMETASI NILAI-NILAI DEMOKRASI DALAM PEMBELAJARAN
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN DI SMP USDATARA
KOTA SORONG

Diajukan Oleh

Nama : Ruce Sangkek

Nim : 148720521015

Telah Disetujui oleh Pembimbing :

Pembimbing I

Jusmin, S.Sos. M.E.c.Dev.

NIDN . 1401088801

(..........)

Pembimbing II

Dwi Septipane, M.Pd.

NIDN. 14120888802

(..........)

ii

LEMBAR PENGESAHAN

IMPLEMENTASI NILAI-NILAI DEMOKRASI DALAM PEMBELAJARAN
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN DI SMP
USDATARA KOTA SORONG

NAMA: Ruce Sangkek
NIM : 148720521015

Skripsi ini telah disahkan oleh Dekan Fakultas Pendidikan Bahasa, Sosial, dan Olahraga
Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong

Pada :

Dekan Fakultas Pendidikan Bahasa, Sosial Dan Olahraga (Fabio)



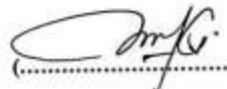
Roni Andri Pramita, M.Pd.
NIDN.1411129001

Tim Penguji Skripsi

1. Dr. Ihsan, S.Pd., M.Pd.
NIDN.1419108901


(.....)

2. Lestari, M.Pd.
NIDN. 1402118407


(.....)

3. Jusmin, S.Sos., M.E.c.Dev.
NIDN.1401088801


(.....)

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar Pustaka

Sorong,

Yang membuat pernyataan,

Ruce Sangkek
148720521015

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

**“KARENA MASA DEPAN SANGGUH ADA, DAN HARAPANMU TIDAK AKAN
HILANG**

(AMSAL 23:18)

PERSEMBAHAN

Dengan rasa Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Saya Persembahkan karya kecilku dipersembahkan sebagai tanda cinta kasih sayang dan rasa terima kasih kepada:

1. Bapa dan Mama tercinta Sakeus sangkek, Dina kambu dan ketiga kak tersayang Yohanis Sangkek, Herman Sangkek dan Theodorus Eskia Sangkek yang selalu mendukung penulis dalam materi maupun moril serta Doa sehingga skripsi ini diselesaikan dengan baik.
2. Teman-teman sahabatku Paulina Klasjok, Diana Warmasen, Desta Nahtalia Fonataba, Oktoriance edowai, Hellena Yesmbise yang dimana selalu mendukung dalam menyemangati saya dari awal hingga sampai ke tahap ini, tak lupa kami ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya untuk teman olim kambaya dan Kak terkasih Orpa howay yang dimana juga selalu membantu dan mensupport saya
3. kepada Semua Pihak secara langsung maupun tidak langsung, yang tidak bisa menulis sebutkan disini satu persatu atas bantuan dan perhatinnya selama penyusunan skripsi

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji syukur panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya yang senantiasa menyertai penulis, sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul *“Implementasi Nilai-Nilai Demokrasi dalam Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMP Usdata”* ini dengan baik. skripsi ini disusun sebagai upaya untuk mengkaji penerapan nilai-nilai demokrasi di lingkungan sekolah, khususnya dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan strategi pembelajaran PPKn yang lebih efektif dalam menanamkan nilai-nilai demokrasi kepada peserta didik. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi tenaga pendidik, pengambil kebijakan di lingkungan pendidikan, serta pihak-pihak yang berkepentingan dalam meningkatkan kualitas pendidikan karakter di sekolah.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis dengan keterbatasan, ketidakmampuan yang dimiliki sehingga, materi maupun wawasan yang bersifat ilmiah jauh dari kesempurnaan, namun penulis telah berusaha untuk menyelesaikannya dengan baik. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak akan lancar dan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu,

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan semua dukungan moril maupun materi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan kali ini juga penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih khususnya kepada:

1. Bapak Dr. Rustamadi, M.Si. Selaku Rektor Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong.
2. Bapak Roni Andri Pramita, M.Pd. Selaku Dekan Fakultas Bahasa, Sosial, Dan Olahraga yang telah memberikan izin dalam Menyusun Skripsi ini.

3. Ibu Ernawati Simatupang, M.Pd. Selaku Kaprodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang telah memberikan izin dalam menyusun skripsi ini
4. Bapak Jusmin, S.Sos.M.E.c.Dev. Selaku Dosen Pembimbing Satu saya yang telah banyak mencurahkan waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing selama proses penulisan skripsi ini
5. Ibu Dwi Septipane, M.Pd. Selaku Dosen Pembimbing dua yang juga telah banyak mencurahkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam membimbing dan juga memberikan saran dan masukan selama Menyusun skripisi
6. Teman-teman PPKn Angkatan 2021/2022 yang mendukung, menyemangati penulis dalam menyelesaikan proposal ini,
7. Buat Bapa dan Mama tercinta Sakeus sangkek, Dina kambu dan ketiga kak tersayang Yohanis Sangkek, Herman Sangkek dan Theodorus Eskia Sangkek yang selalu mendukung penulis dalam materi maupun moril serta Doa sehingga skripsi ini diselesaikan dengan baik.
8. Buat Bapak Dr. Yustinus Way dan Ibu Batseba Sangkek S,Pd. Selaku Orang tua wali yang telah memberikan moril dan materil serta doanya sehingga terselesainya skripsi
9. Bapak Melkianus Isir dan ibu Selviana Kambu selaku orang tua wali yang telah memberikan dukungan sehingga selesai skripsi
10. Terimakasih buat teman-teman sahabatku Paulina Klasjok, Diana Warmasen, Desta Nahtalia Fonataba, Oktoriance edowai, Hellena Yesmbise yang dimana selalu mendukung dalam menyemangati saya dari awal hingga sampai ke tahap ini, tak lupa kami ucapakan terimakasih yang sebesarnnya untuk teman olim kambaya dan Kak terkasih Orpa howay yang dimana juga selalu membantu dan mensupport saya
11. Dan yang terakhir kepada Semua Pihak secara langsung maupun tidak langsung, yang tidak bisa menulis sebutkan disini satu persatu atas bantuan dan perhatinnya selama penyusunan skripsi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata kesempurna dan masih banyak kekuarangan, namun penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa dapat membalas semua kebaikan yang di berikan kepada penulis dan memberkati kita semua Amin.

Sorong, Agustus 2025

Ruce Sangkek
NIM. 148720521015

ABSTRAK

Ruce Sangkek/148720521015. IMPLEMENTASI NILAI-NILAI DEMOKRASI DALAM PEMBELAJARAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN DI SMP USDATARA KOTA SORONG. Skripsi Fakultas Bahasa, Sosial, dan Olahraga Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong.

Penelitian ini membahas implementasi nilai-nilai demokrasi dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) di SMP Usdatara, Kota Sorong. Demokrasi merupakan prinsip fundamental yang perlu diajarkan kepada siswa agar mereka dapat menjadi warga negara yang kritis, aktif, dan bertanggung jawab. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi nilai-nilai demokrasi dalam pembelajaran PPKn di SMP Usdatara, serta untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Implementasi nilai-nilai demokrasi dalam pembelajaran PPKn di SMP Usdatara sudah terimplementasi dengan baik dengan nilai-nilai demokrasi yang di tanamkan yaitu nilai kebebasan. Kebebasan berpendapat, kelompok, berpartisipasi, toleransi, saling menghargai, Kerjasama, kebersamaan, menghargai perbedaan pendapat, tanggung jawab dan disiplin yang dilaksanakan melalui pembelajaran berbasis pengalaman langsung, seperti diskusi kelas, simulasi pemilihan, dan musyawarah, maupun ceramah, tanya jawab, dan penugasan yang dimana dapat meningkatkan pemahaman siswa tentang demokrasi. (2) Faktor pendukung pada implementasi nilai-nilai demokrasi dalam pembelajaran PPKn yaitu Sarana dan prasarana Laptop, LDC, LKS, dan beberapa buku paket PPKn, Adapun kegiatan OSIS, serta keteladan guru dan (3) Faktor penghambat implelementasi nilai-nilai demokrasi dalam pembelajaran PPkn di SMP Usdatara yaitu Perbedaan individual siswa. Selain itu, peran guru sebagai fasilitator dan budaya sekolah yang demokratis berkontribusi dalam menciptakan lingkungan belajar yang inklusif. Namun, partisipasi orang tua dalam mendukung pendidikan demokrasi masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi antara sekolah, guru, dan orang tua untuk memperkuat internalisasi nilai-nilai demokrasi pada siswa.

Kata kunci: *Demokrasi, Implementasi Nilai-nilai Demokrasi*

Abstract

RUCE SANGKEK/148720521015. IMPLEMENTATION OF DEMOCRATIC VALUES IN THE LEARNING OF PANCASILA AND CITIZENSHIP EDUCATION AT SMP USDATARA, SORONG CITY. Thesis of the Faculty of Language, Social Sciences, and Sports of Muhammadiyah University (UNIMUDA) Sorong.

This research discusses the implementation of democratic values in the learning of Pancasila and Citizenship Education (PPKn) at SMP Usdatara, Sorong City. Democracy is a fundamental principle that needs to be taught to students so that they can become critical, active, and responsible citizens. This research uses a qualitative approach with data collection techniques in the form of interviews, observations, and documentation. The purpose of this research is to find out how the implementation of democratic values in PPKn learning at SMP Usdatara is carried out, as well as to identify supporting and inhibiting factors. The results show that (1) the implementation of democratic values in PPKn learning at SMP Usdatara is already implemented well with the values of democracy that are instilled, namely the values of freedom. Freedom of opinion, groups, participation, tolerance, mutual respect, cooperation, togetherness, appreciating differing opinions, responsibility, and discipline are carried out through experiential learning, such as class discussions, election simulations, and deliberations, as well as lectures, Q&A sessions, and assignments that can enhance students' understanding of democracy. (2) Supporting factors in the implementation of democratic values in PPKn learning include facilities and infrastructure such as laptops, LDCs, worksheet materials, and several PPKn textbooks. Additionally, activities of the student council (OSIS), as well as the exemplary role of teachers, contribute to this. (3) Hindering factors for the implementation of democratic values in PPKn learning at SMP Usdatara include individual differences among students. Furthermore, the role of teachers as facilitators and a democratic school culture contribute to creating an inclusive learning environment. However, participation Parents' support in promoting democratic education still needs to be enhanced. Therefore, collaboration between schools, teachers, and parents is necessary to strengthen the internalization of democratic values in students.

Keywords: Democracy, Implementation of Democratic Values.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah	3
1.3. Tujuan Penelitian	4
1.4. Manfaat Penelitian.....	4
1.5. Definisi Operasional	5
5.1.1. Nilai-Nilai.....	6
5.1.2. Demokrasi.....	6
5.1.3. Implementasi Nilai-nilai Demokrasi	6
5.1.4. Pembelajaran	7
5.1.5. Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	9
2.1. Pengertian Nilai	9
2.2. Pengertian Demokrasi.....	10
2.3. Nilai-Nilai Demokrasi	13
2.4. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.....	19
2.5. Hasil Penelitian Yang Terdahulu.....	36
2.6. Novelty/ Kebaruan Penelitian	40
2.7. Kerangka Berpikir	41

2.8. Definisi Operasional Variabel	42
BAB III METODE PENELITIAN	44
3.1. Jenis Penelitian	44
3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian	44
3.3. Subjek dan Objek	44
3.4. Sumber Data	45
3.5. Instrumen penilaian	46
3.6. Teknik Pengumpulan Data.....	46
3.7. Teknik Analisi Data	48
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	50
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	50
1. Identitas Tempat Penelitian	50
4.2 Hasil Penelitian.....	51
4.3 Pembahasan	53
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	72
5.1 Kesimpulan.....	72
5.2 Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN	78
1. Lampiran Instrumen.....	79
2. Lampiran Observasi.....	101
3. Lampiran Dokumentasi	112
4. Lampiran lembar bimbingan SUP	118
5. Lampiran lembar bimbingan Skripsi	120
6. Lampiran surat izin penelitian skripsi	122
7. Lampiran surat permohonan Dosen validator	123
8. Lampiran lembar validasi	124
9. Lampiran surat keterangan penelitian dari Sekolah	125
10. Lampiran Absen Siswa	126

11. Riwayat Hidup.....	128
------------------------	-----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kegiatan masyarakat yang demokratis menjadi kondisi ideal bagi hubungan nasional serta kehidupan bernegara. Pada kehidupan masyarakat semacam ini, setiap orang mempunyai hak yang setara tanpa memandang latar belakang sosial maupun biologis. Sebagai negara demokratis, Indonesia berupaya menanamkan nilai-nilai demokrasi dalam pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat, di mana setiap warga memiliki hak yang harus dihormati sekaligus menjalankan tanggung jawabnya.

Sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, Indonesia menghadapi berbagai permasalahan terkait pelanggaran demokrasi, khususnya dalam pelaksanaan pemilihan umum. Bentuk pelanggaran tersebut meliputi praktik transaksional dalam politik, pelanggaran hak pilih, upaya penyebaran nama baik dalam politik, manipulasi jumlah rekapitulasi pemilih sah, serta kurangnya profesionalisme dari panitia penyelenggara pemilu.

Pendidikan berfungsi sebagai faktor utama dalam menanamkan prinsip demokrasi kepada generasi penerus bangsa, sekolah sebagai lembaga penyelenggara pendidikan, harus mampu melaksanakan pendidikan demokrasi. Proses pembelajaran PPKn di sekolah menjadi sarana utama untuk menanamkan demokrasi, sehingga nilai-nilai demokrasi bisa terinternalisasikan pada setiap generasi bangsa Indonesia.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) berfungsi untuk menjalankan peran tertentu dalam proses pendidikan dan tujuan utama dalam proses pembentukan sifat dan nilai-nilai moral siswa supaya memiliki sikap demokratis terhadap nilai-nilai yang

terdapat dalam Pancasila serta penerapan dari nilai-nilai tersebut, demokrasi dalam mata pelajaran PPKn menjadi esensial dalam membangun kesadaran berpolitik, menghargai keberagaman, serta menumbuhkan partisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Di SMP Usdatara Kota Sorong, pembelajaran PPKn diharapkan tidak terbatas pada penyampaian pengetahuan seyng teoretis mengenai demokrasi sekaligus membentuk karakter siswa agar memiliki kemampuan untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip demokrasi yang diaktualisasikan dalam aktivitas kehidupan sehari-hari.

Di SMP Usdatara, Kota Sorong, penerapan sikap dan nilai demokratis dalam aktivitas belajar PPKn diharapkan dapat membentuk situasi belajar yang baik dan menumbuhkan peserta didik yang aktif, kritis, dan bertanggung jawab. Kenyataan yang terjadi menunjukkan guru-guru di SMP Usdatara ini telah menggunakan pendekatan pembelajaran yang melibatkan partisipasi siswa, seperti presentasi, diskusi kelompok, musyawarah kelas, pemilihan ketua kelas secara demokratis, serta memberikan siswa hak untuk menyampaikan gagasan atau pendapat dalam proses pembelajaran. Pendekatan ini mencerminkan adanya komitmen dari pihak sekolah dalam membangun suasana belajar yang inklusif dan partisipatif.

Namun, ada saja masalah yang masih muncul saat menerapkannya. Salah satu masalah utama adalah siswa tidak terlibat secara aktif dalam diskusi di kelas. Ini disebabkan oleh kurangnya kepercayaan diri dan budaya belajar. Dan ada pun masalahnya disekolah ini yaitu kegiatan ekstrakurikuler yang juga berkontribusi dalam membentuk ajaran-ajaran demokrasi yang tercermin pada kegiatan osis atau organisasi internal sekolah yang dikelola siswa dan belum berjalan secara efektif, sehingga ini membuat belum optimalnya peran OSIS dalam melaksanakan nilai-nilai demokrasi atau

ajaran-ajaran demokrasi di sekolah juga berpotensi menjadi faktor yang menghambat implementasi nilai-nilai demokrasi. Secara lebih luas, kenyataannya, dunia pendidikanlah yang paling banyak memiliki Beberapa permasalahan yang terjadi antara lain guru yang bersikap otoriter, adanya diskriminasi sosial, konflik antar pelajar, serta tindakan bullying diantara Terhadap siswa, sebagian guru masih menerapkan gaya mengajar yang bersifat otoriter.

Selain itu, penelitian lain menunjukkan bahwa penerapan sikap demokratis dalam kegiatan pembelajaran PPKn dapat dilakukan melalui metode diskusi, pemilihan ketua kelas secara demokratis, serta kegiatan ekstrakurikuler yang mendorong kebebasan berekspresi dan musyawarah (Rawanoko & Wuryandani, 2018). Pembelajaran dengan metode diskusi serta studi kasus efektif dalam meningkatkan penguasaan materi siswa terhadap konsep demokrasi dan praktiknya di masyarakat (Mazid & Suharno, 2019). Selain itu, siswa dapat menjadi lebih demokratis jika kegiatan sekolah seperti musyawarah kelas dan organisasi siswa (OSIS) menerapkan partisipasi rakyat atau demokrasi.

Dari penjelasan diatas, peneliti bermaksud permasalahan ini secara detail bagaimana cara mengimplementasikan nilai-nilai demokrasi pada pelajaran PPKn, dan apa unsur-unsur yang menjadi pendorong maupun penghambat dalam penerapan nilai-nilai demokrasi Di SMP Usdatara Kota Sorong

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi nilai-nilai demokrasi pada mata Pelajaran PPKn di SMP Usdatara kota Sorong?
2. Faktor-fakor pendukung dan penghambat pada proses Implementasi Nilai-Nilai Demokrasi Dalam Mata Pelajaran PPKn di SMP Usdatara kota Sorong?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui implementasi nilai-nilai demokrasi pada mata pelajaran PPKn di SMP Usdatara Kota Sorong
2. Untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dalam proses implementasi nilai-nilai demokrasi pada mata pelajaran PPKn di SMP Usdatara Kota Sorong.
3. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam proses implementasi nilai-nilai demokrasi pada mata pelajaran PPKn di SMP Usdatara Kota Sorong.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi peneliti selanjutnya yang mengkaji implementasi nilai-nilai demokrasi. Selain itu, Hasil penelitian ini diharapkan mampu memperluas pengetahuan dalam bidang keilmuan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, terutama terkait dengan penerapan nilai-nilai demokrasi bagi mahasiswa Program Studi Pembelajaran PPKn di Fakultas Pendidikan Bahasa, Sosial, dan Olahraga Universitas Pendidikan

Muhammadiyah Sorong, serta secara lebih luas bermanfaat bagi pembaca pada umumnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan serta pemahaman kepada guru terkait penerapan nilai-nilai demokrasi dalam mata pelajaran PPKn memiliki manfaat yang luas. Bagi pihak sekolah, temuan penelitian ini dapat dijadikan landasan dalam upaya menanamkan, membina, serta menyosialisasikan prinsip, pemikiran, serta menanamkan nilai-nilai demokrasi bagi peserta didik. Sementara itu, bagi siswa, penelitian ini diharapkan mampu menjadi sarana agar menumbuhkan pemahaman, sikap, dan keterampilan berdemokrasi pada aktivitas sehari-hari. Memberi manfaat untuk mengamalkan asas demokrasi agar memahami konsep demokrasi dan membiasakan hidup secara demokratis. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi media untuk memperluas wawasan serta memperdalam pengetahuan, khususnya dalam memahami dan mengkaji penerapan nilai-nilai demokrasi dalam mata pelajaran PPKn

1.5 Definisi Operasional

1.5.1 Nilai -Nilai

Nilai diartikan sebagai sesuatu yang diyakini baik, berguna, serta paling sesuai menurut pandangan individu maupun kelompok tertentu. Kata “nilai” tersebut berasal dari bahasa latin *valere* yang artinya bermanfaat, mampu, berkehendak, berdaya, atau berlaku. Menurut Firwan (2017, dalam Nurlinda et al., 2024), nilai merupakan karakteristik dari sesuatu yang membuatnya disukai, dicari, dikejar, dihargai, berguna, serta mampu mengangkat pemiliknya ke status yang lebih tinggi.

Nilai merupakan segala hal yang dianggap berharga, memiliki mutu tinggi, mencerminkan kualitas, dan memberi manfaat bagi orang lain. Menurut Divine (2021:15 dalam Nurlinda et al., 2024), sesuatu dapat dinilai apabila memiliki nilai atau manfaat bagi kehidupan manusia.

1.5.2 Demokrasi

Demokrasi dipahami sebagai bentuk pemerintahan dengan kedaulatan tertinggi berada pada rakyat demi kepentingan masyarakat. Secara etimologis, Demokrasi berarti kekuasaan rakyat, kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani, dengan *demos* bermakna rakyat dan *kratos* bermakna kekuasaan, dalam KBBI, demokrasi dapat diartikan sebagai pola kehidupan yang mengedepankan persamaan hak dan kewajiban, serta keadilan dalam perlakuan bagi semua orang. Menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah pemerintahan yang bersumber dari rakyat, dijalankan oleh rakyat, dan untuk kepentingan rakyat. (Dalam M. Alwin Abdillah, 2019).

1.5.3 Implementasi Nilai-nilai Demokrasi

Pada penelitian ini, implementasi nilai-nilai demokrasi merujuk pada sikap dan tingkah laku peserta didik yang tercermin dalam kemampuan mereka untuk bersikap toleran, menghormati perbedaan pendapat, menjalin kebersamaan, menunjukkan rasa percaya diri, disiplin, serta bertanggung jawab.

1.5.4 Pembelajaran

Istilah “pembelajaran” berakar dari kata dasar “ajar” yang memiliki arti petunjuk atau bimbingan agar dapat dipahami dan diikuti. Setelah mendapat imbuhan awalan *pe-* dan akhiran *-an*, terbentuk istilah *pembelajaran* yang merujuk pada suatu proses,

tindakan, atau cara mengajarkan sesuatu agar membangkitkan motivasi belajar pada diri peserta didik. Menurut Ahdar Djamaluddin (2019:6, dalam Astri Azani et al., 2024), Pembelajaran adalah suatu proses terjadinya interaksi antara siswa, guru, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar. Secara hakikat, Menurut Bunyamin (2021:78), pembelajaran adalah proses interaksi antara guru dan siswa yang dapat terjadi secara langsung melalui pertemuan tatap muka atau secara tidak langsung melalui pemanfaatan berbagai media pembelajaran. Corey menambahkan bahwa pembelajaran dipahami sebagai suatu proses yang dilakukan dengan cara mengatur lingkungan individu secara sengaja diatur sedemikian rupa agar memungkinkan mereka berpartisipasi dalam perilaku tertentu atau menimbulkan respons terhadap situasi tertentu.

1.5.5. Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Pelajaran PPKn di SMP sangat berkaitan dengan nilai-nilai demokrasi. Tujuannya adalah mendidik siswa agar tumbuh menjadi warga negara yang demokratis, bertanggung jawab, dan mau ikut serta dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Beberapa aspek yang menunjukkan hubungan tersebut antara lain:

1. Penanaman nilai-nilai demokrasi melalui PPKn mencakup pengajaran prinsip-prinsip dasar demokrasi, antara lain sikap toleran, menghormati perbedaan pendapat, menumbuhkan kebersamaan, rasa percaya diri, kedisiplinan, serta tanggung jawab.
2. Penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia dan Musyawarah Siswa dikenalkan pada pentingnya menghormati hak asasi manusia, melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat, serta menghargai kebebasan berpendapat.

3. Penerapan Demokrasi dalam Kehidupan Sekolah Siswa diajarkan cara menerapkan prinsip demokrasi dalam aktivitas sehari-hari di sekolah, misalnya melalui keikutsertaan dalam organisasi siswa, diskusi kelompok, dan pemilihan ketua kelas.
4. Pendidikan Kewarganegaraan yang Aktif PPKn membekali siswa dengan pemahaman mengenai hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara dalam sistem demokrasi, termasuk menghormati perbedaan pendapat dan bekerjasama dengan orang lain.
5. Sikap Kritis dan Partisipatif Siswa didorong untuk berpikir kritis terhadap isu sosial dan politik serta aktif berpartisipasi dalam kegiatan sosial yang mencerminkan nilai-nilai demokrasi.
6. Pengembangan Karakter Demokratis Melalui pembelajaran PPKn tentang demokrasi, siswa diharapkan mampu membangun karakter yang toleran, adil, dan bertanggung jawab dalam aktivitas sosial kemasyarakatan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Nilai

Kata *nilai*, menurut pandangan Sutarjo Adisusilo, Kata ini berasal dari bahasa Latin *valere*, yang maknanya berguna, tangguh, dan berkemampuan, dalam perkembangan pemahaman, nilai dipandang sebagai sesuatu yang dianggap benar, baik, dan bernilai bagi kehidupan individu sehari-hari (Bahroni, 2018). Sutarjo menekankan bahwa nilai merupakan kualitas yang membuat sesuatu dihargai, dicari, diinginkan, dibutuhkan, serta memberikan martabat bagi individu yang meyakiniinya. Nilai juga berperan mendorong seseorang bertindak sesuai dengan keyakinan yang dianggap benar. Selain itu, nilai dapat dipahami sebagai standar yang diterima dalam masyarakat dan dinilai bernilai serta baik. Nilai ini bisa bersifat tersurat maupun tersirat, serta menjadi ciri khas yang membedakan suatu kelompok sosial dari kelompok lainnya yang berkaitan dengan keinginan bersama yang pada akhirnya memengaruhi pilihan serta tindakan individu (Armet dkk., 2021).

Menurut Lubis menyatakan bahwa nilai adalah komponen penting dalam hidup seseorang. Nilai adalah dasar dari semua tindakan seseorang (Yulianto et al., 2020). Jadi, tindakan seseorang menunjukkan nilai-nilai yang dia percayai, karena dia menggunakannya sebagai dasar dan prinsip dalam menjalani kehidupannya. Nilai, menurut Hery Noer Aly, memberikan motivasi dan keyakinan untuk tindakan seseorang dalam hidupnya (Bahroni, 2018).

Nilai pada dasarnya merupakan keyakinan yang dimiliki seseorang bahwa tindakannya benar atau paling tepat. Menurut L. Sagiv dan S. H. Schwartz nilai kemanusiaan bergantung pada nilai-nilai dasar yang bersifat fundamental pada manusia dan dipengaruhi oleh kondisi sosial serta norma budaya (dalam Rezer, 2021). Secara umum, nilai dipahami sebagai sesuatu yang bermanfaat dan memiliki kekuatan. Kekuatan ini merujuk pada kemampuan individu untuk meyakini tindakannya atau mengubahnya agar menjadi lebih baik.

Dari penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa nilai merujuk pada sesuatu yang memiliki nilai dan manfaat pada aktivitas sehari-hari manusia. Nilai dipahami adalah konsep abstrak dalam diri individu yang menjadi dasar penentuan terhadap apa yang dianggap baik dan kurang memuaskan.

2.2. Pengertian Demokrasi

Demokrasi diartikan sebagai sebuah sistem politik yang menempatkan rakyat menjadi pemilik kedaulatan tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan pada rakyat, di mana masyarakat memiliki peran dalam demokrasi, proses pengambilan keputusan dapat berlangsung secara langsung oleh rakyat maupun melalui wakil yang mereka pilih. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan yang menekankan keterlibatan rakyat dalam setiap proses penentuan keputusan serta pelaksanaannya, kebijakan melalui perwakilan, sehingga dikenal sebagai pemerintahan dari rakyat. Demokrasi juga menekankan adanya kesamaan hak dan tanggung jawab serta menjamin keadilan bagi seluruh warga negara. Kata demokrasi secara etimologis bersumber dari bahasa Yunani, terdiri atas *demos* (rakyat) dan *cratos* (kekuasaan/pemerintahan). Oleh karena itu, demokrasi

diartikan sebagai bentuk pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Berbagai ahli kemudian memberikan tafsiran yang beragam tentang demokrasi sesuai dengan perspektif masing-masing (Dewi & Al-Khansa, 2021; Nurgiansah, 2021).

Berikut merupakan pengertian demokrasi menurut para ahli:

1. Abraham Lincoln menjelaskan demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang bersumber dari masyarakat, dan dijalankan oleh masyarakat serta diperuntukkan bagi kepentingan rakyat.
2. Charles Costello memandang demokrasi sebagai suatu tatanan sosial dan politik, di mana kewenangan pemerintah dibatasi oleh hukum dan norma budaya, dengan tujuan utama melindungi hak-hak setiap individu sebagai warga negara.
3. Menurut Hans Kelsen, demokrasi dipahami sebagai suatu bentuk pemerintahan yang bersumber dari rakyat serta diselenggarakan untuk kepentingan rakyat, di mana jalannya kekuasaan negara dilaksanakan oleh wakil-wakil rakyat yang dipilih. Dalam pandangan ini, rakyat percaya bahwa keinginan serta kepentingan mereka akan diakomodasi dalam praktik penyelenggaraan negara.
4. Joseph Schumpeter menjelaskan bahwa demokrasi adalah suatu sistem di mana pemimpin politik dipilih melalui pemungutan suara, menekankan pentingnya pemilu dalam menentukan siapa yang memegang kekuasaan.
5. Sidney Hook mendefinisikan demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan yang menetapkan bahwa keputusan pokok dijalankan melalui persetujuan mayoritas, baik secara langsung maupun melalui perwakilan, dengan persetujuan tersebut diberikan secara sukarela oleh rakyat yang telah cukup usia.

6. Henry B. Mayo mengemukakan bahwa demokrasi dipandang sebagai suatu sistem politik yang ditandai dengan penentuan kebijakan umum yang didasarkan pada keputusan mayoritas diwujudkan melalui perwakilan rakyat. Masyarakat melakukan pengawasan yang efektif terhadap pemerintahan melalui pemilu yang dilaksanakan secara teratur, berpegang pada prinsip kesetaraan politik, dan berlangsung dalam kondisi yang menjamin adanya kebebasan politik.

Dalam pandangan (Affan Ghaffar 2000 ; Dalam Ephivani Kuartis Nabus & Chostina Siahaan 2021), demokrasi ditinjau dari dua sisi, yakni dari perspektif normatif serta empiris.

- a. Demokrasi normatif menggambarkan demokrasi sebagaimana mestinya dijalankan secara ideal oleh negara.
- b. Demokrasi empiris adalah bentuk demokrasi yang terealisasi dalam kegiatan politik yang sebenarnya.

Demokrasi telah menjadi pilihan utama pada berbagai tingkatan dalam kehidupan sosial dan kenegaraan di banyak negara. Menurut Moh. Mahfud MD, ada dua alasan mendasar mengapa sistem pemerintahan yang berlandaskan kedaulatan rakyat dipilih. Pertama, hampir seluruh negara di dunia menjadikannya sebagai asas fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kedua, demokrasi secara esensial memberi arah bagi peran serta masyarakat dalam mengelola negara sebagai organisasi tertinggi. Dengan demikian, demokrasi bukan hanya dipandang sebagai sistem politik, tetapi juga sebagai landasan penting yang menegaskan peran rakyat dalam menentukan arah kehidupan berbangsa. Oleh karena itu, pemahaman yang

benar mengenai demokrasi merupakan aspek yang memiliki peranan sangat esensial bagi setiap warga negara.

2.3. Nilai-Nilai Demokrasi

Nilai merupakan hal yang berhubungan dengan sesuatu yang baik dan juga sesuatu hal yang buruk serta menjadikan dasar untuk keputusan hidup manusia. Nilai tidak memiliki batas, sehingga semua yang ada di dunia ini bernilai nilai diartikan sebagai ukuran atau harga. Jadi, nilai-nilai demokrasi merupakan suatu prinsip atau cara pandang hidup yang menekankan dan menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, sekaligus mengedepankan sikap saling menghargai perbedaan pendapat, serta menjunjung sikap saling memahami mengakui perbedaan masyarakat, dan memperlakukan semua warga negara dengan cara yang sama. Sesungguhnya, nilai-nilai demokrasi merupakan prinsip-prinsip yang dibutuhkan dalam mewujudkan suatu pemerintahan yang demokratis. Terbentuknya pemerintahan demokratis hanya dapat berlangsung apabila didasarkan pada nilai-nilai tersebut atau kondisi ini; tanpanya, pemerintahan demokratis akan sulit didirikan.

Menurut Zamroni (2001), nilai-nilai demokrasi termasuk saling menghargai, toleransi, kebebasan untuk mengemukakan pendapat, komunikasi terbuka, kebersamaan, dan tanggung jawab. (Dalam Alifia Azzahra¹, Bambang Sumardjoko 2. 2023).

Adapun nilai-nilai demokrasi dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Toleransi

Toleransi adalah sikap yang menghormati serta menjunjung tinggi perbedaan yang ada hak-hak setiap individu, Dalam teori Zamroni (Bambang Yuniarto, 2018, Dalam Yusfitra Nurul Hidayati¹, Bahrul Sri Rukmini²,2024), Demokrasi dapat tumbuh dengan baik apabila masyarakat menanamkan nilai-nilai demokratis dalam kehidupan sehari-hari, seperti toleransi, kebebasan berpendapat, keterbukaan, menghargai perbedaan, serta menjunjung tinggi martabat manusia. Dari hal tersebut, toleransi menjadi salah satu nilai penting yang harus ditanamkan, terutama pada peserta didik agar terbiasa menghargai dan menghormati perbedaan. Di sekolah, penerapan nilai toleransi sudah tampak dalam berbagai aktivitas. Misalnya, peserta didik saling menghargai ketika teman-temannya menjalankan ibadah sesuai Kebebasan beragama dan berkeyakinan tetap dihormati. Selama pembelajaran Pendidikan Agama Islam, siswa non-Muslim tetap hadir di kelas dan menjalani kegiatan dengan tertib, menjaga suasana tetap kondusif. Dalam pergaulan sehari-hari, peserta didik juga tidak membedakan teman berdasarkan agama maupun kondisi fisik. Guru turut berperan dengan memberikan pemahaman kepada siswa untuk saling menghargai serta membantu teman yang memiliki kebutuhan khusus. Selain itu, budaya sopan santun juga tercermin dari sikap peserta didik yang selalu menghormati seluruh warga sekolah.

b. Menghargai Perbedaan Berpendapat

Dalam teori Zamroni (Bambang Yuniarto, 2018, Dalam Yusfitra Nurul Hidayati¹, Bahrul Sri Rukmini²,2024), Menurut teori tersebut, demokrasi akan tumbuh dan mengakar kuat apabila dalam masyarakat berkembang kebiasaan serta nilai yang mencerminkan demokrasi, seperti sikap saling menghargai perbedaan menyampaikan serta menghargai adanya pandangan yang berbeda terbuka dalam komunikasi,

menghormati martabat setiap orang, memiliki rasa percaya diri, saling menghargai, menahan diri, menjaga kebersamaan, dan mempertahankan keseimbangan. Dengan demikian, untuk membangun budaya demokrasi yang kokoh, masyarakat perlu menanamkan nilai kebebasan berpendapat. Dalam penerapannya, nilai demokrasi berupa kebebasan berpendapat telah dilaksanakan dalam proses pembelajaran. Guru memberikan ruang kepada peserta didik untuk mengemukakan gagasan tanpa langsung menyalahkan, meskipun terjadi perbedaan pendapat. Guru memberikan ruang kepada peserta didik untuk mengemukakan gagasan tanpa langsung menyalahkan, meskipun terjadi perbedaan pendapat. Guru menyimpulkan beragam pendapat yang telah diutarakan, lalu memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya dan menjawab. Meski demikian, proses tersebut belum terlaksana secara optimal karena masih ada siswa yang kurang berpartisipasi, merasa malu, minder, ataupun tidak berani mengutarakan pendapat.

c. Nilai Demokrasi Terbuka Dalam Berkomunikasi

Dalam teori yang dikemukakan Zamroni (dalam Bambang Yuniarto, 2018, dalam Yusfitra Nurul Hidayati¹, Bahrul Sri Rukmini², 2024), ditegaskan bahwa demokrasi akan berkembang dan menguat apabila dalam masyarakat tumbuh budaya serta nilai-nilai demokrasi mencakup toleransi, kebebasan dalam menyampaikan serta menghargai perbedaan pendapat, pemahaman terhadap keberagaman sosial, keterbukaan dalam berkomunikasi, penghargaan terhadap nilai dan martabat kemanusiaan, kemandirian, sikap saling menghormati, kemampuan mengendalikan diri, menjunjung kebersamaan, serta menjaga keseimbangan. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa keterbukaan dalam komunikasi merupakan salah satu unsur penting

dalam penerapan nilai demokrasi penting untuk ditanamkan pada setiap individu, agar budaya demokrasi terus berkembang dalam kehidupan masyarakat.

d. Saling Menghargai

Menurut Poerwadarminta (Hamdi et al., 2019, dalam Alifia Azzahra1 & Bambang Sumardjoko2, 2023), menghargai berarti menghormati pendapat orang lain. Sikap saling menghargai mencakup penghormatan terhadap hak-hak orang lain serta pemberian kesempatan yang sama bagi setiap individu.

e. Kebersamaan

Demokrasi menuntut individu untuk berkembang sebagai makhluk sosial dalam masyarakat, yang mencakup kemampuan bekerja sama dalam memecahkan masalah dan ikut serta dalam kegiatan demi kepentingan bersama. Nilai-nilai kemanusiaan dan kebersamaan menjadi bagian penting dalam proses ini.

f. Tanggung Jawab

Dalam teori yang dikemukakan Rusli Karim (Bambang Yuniarto 2018, dalam Yusfitra Nurul Hidayati1, Bahrul Sri Rukmini2, 2021), Agar kehidupan yang demokratis dapat terbangun, setiap individu perlu memiliki kepribadian yang demokratis. Kepribadian ini tercermin dalam inisiatif, resiprositas, toleransi, Transparansi, kesungguhan, kesadaran akan kewajiban, kerja sama, dan keterhubungan. Dari teori tersebut terlihat bahwa tanggung jawab menjadi salah satu nilai demokrasi penting yang harus diinternalisasikan dalam diri individu untuk menopang kehidupan demokratis.

g. Displin

Kata disiplin menjadi dasar terbentuknya istilah kedisiplinan yang menurut Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI) istilah disiplin dimaknai sebagai ketaatan atau kepatuhan terhadap peraturan, tata tertib, dan aturan lainnya. Siswa, sebagai peserta didik, merupakan subjek pendidikan yang diharapkan menerapkan kedisiplinan ini. Kedisiplinan siswa yang dimaksud adalah kepatuhan mereka terhadap tata tertib sekolah dan aturan yang berkaitan dengan kehidupan kesiswaan. Istilah disiplin sendiri sudah umum digunakan pada rutinitas sehari-hari, baik di lingkungan sekolah, tempat kerja, rumah, maupun kegiatan lainnya. Disiplin merupakan tata tertib yang mengatur kehidupan individu maupun kelompok. Tata tertib tersebut dibuat oleh manusia, bukan binatang, dan disiplin muncul dari dorongan internal untuk menaati aturan tersebut. Dengan demikian, disiplin dapat dipahami sebagai kepatuhan terhadap tata tertib, dan berdisiplin berarti mematuhi peraturan yang berlaku. (Djamarah, 2002:12 dalam Martina Embong 2021).

Dengan demikian, nilai-nilai demokrasi pada tingkat individu sebaiknya dipahami sebagai cerminan perilaku sehari-hari yang terlihat melalui sikap dan tindakan. Nilai-nilai tersebut sejalan dengan prinsip demokrasi yang diajarkan dalam Pendidikan Kewarganegaraan, yakni perilaku yang menekankan menempatkan kebutuhan kolektif lebih tinggi dibandingkan kebutuhan individu atau golongan. Perbedaan pendapat, pemikiran, atau Perbedaan kepentingan dapat diselesaikan Melaksanakan musyawarah guna mencapai mufakat, dengan tetap memelihara nilai kekeluargaan yang mencerminkan identitas bangsa Indonesia.

Keputusan yang ditetapkan wajib dipertanggungjawabkan dan didalam kehidupan bermasyarakat, setiap individu secara moral bertanggung jawab beriman

kepada Tuhan Yang Maha Esa diwujudkan dengan menghargai martabat manusia, menegakkan prinsip kebenaran dan keadilan, serta mengutamakan persatuan untuk kepentingan bersama. Nilai-nilai tersebut ditanamkan melalui proses pembiasaan atau sosialisasi, yang juga mencakup pembentukan perilaku demokratis.

Kelas menjadi sarana untuk membangun kembali perilaku demokratis melalui beragam aktivitas pembelajaran. Lingkungan kelas memiliki peranan penting dalam proses sosialisasi, sehingga upaya guru dalam menciptakan suasana belajar dilakukan melalui penerapan metode mengajar yang kreatif. akan mendorong terciptanya interaksi demokratis, baik antara guru dan siswa maupun antar siswa. Salah satu esensi pendidikan demokrasi terletak pada keterlibatan setiap elemen di lingkungan sekolah turut mengendalikan jalannya pendidikan guna mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan yang berlandaskan nilai-nilai demokratis akan berkembang kuat apabila dalam diri peserta didik tertanam budaya demokrasi, seperti sikap toleransi, kebebasan dalam menyampaikan pendapat sekaligus menghormati perbedaan, serta keterbukaan dalam berkomunikasi, saling menghargai, kebersamaan, dan tanggung jawab. Peneliti menekankan pentingnya implementasi budaya demokrasi dalam lingkungan sekolah, sebab setiap persoalan sebaiknya diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat. Beberapa contoh masalah yang dapat dibicarakan melalui musyawarah antara lain:

1. Mengadakan diskusi kelas dalam rangka menyusun tata tertib sekolah.
2. Melaksanakan pemilihan ketua kelas secara musyawarah.
3. Membentuk piket kelas melalui kesepakatan bersama.
4. Mengadakan pemilihan ketua OSIS secara demokratis.

Dengan kata lain, nilai-nilai demokrasi berfungsi sebagai pegangan bagi guru serta siswa dalam mewujudkan suasana yang adil dan penuh kebersamaan di lingkungan sekolah.

2.4. Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan

Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dalam jalur formal mulai diperkenalkan di Indonesia yang disebut Civics pada Kurikulum tingkat SMA yang berlaku sejak tahun 1962, pelajaran tersebut mencakup materi mengenai sistem pemerintahan di Indonesia yang berlandaskan UUD 1945, serta pengalaman belajar yang bersumber dari mata pelajaran dan materi yang meliputi ilmu sejarah, kajian geografi, bidang ekonomi, ranah politik, teks pidato presiden, dan naskah deklarasi hak asasi manusia, hingga pemahaman mengenai PBB. Pada kurikulum 1975, Istilah *Civics* kemudian diberi nama Penyusunan materi dalam Pendidikan Moral Pancasila (PMP) dilakukan berdasarkan pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) ditetapkan berdasarkan amanat Tap MPR No. II/MPR/1973. Pendidikan Moral Pancasila (PMP) diberlakukan sebagai mata pelajaran wajib pada setiap tingkat pendidikan, mulai dari sekolah dasar, menengah pertama, menengah atas, sekolah pendidikan guru (SPG), hingga sekolah kejuruan. Baik nama maupun materi pelajaran ini tetap dipertahankan hingga diterapkannya Kurikulum 1984 sebagai penyempurnaan dari Kurikulum 1975.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya Pasal 39, mengatur bahwa penyelenggaraan pendidikan wajib memasukkan Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan ke dalam kurikulum pendidikan di seluruh jenjang, dalam setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan. Ketentuan tersebut

kemudian diwujudkan melalui Kurikulum 1994 yang menetapkan PPKn sebagai mata pelajaran di tingkat pendidikan dasar dan menengah. Aturan ini berbeda dengan kurikulum sebelumnya yang menerapkan pendekatan berbeda terhadap PPKn dalam Kurikulum 1994 memiliki karakteristik yang lebih spesifik tidak lagi berlandaskan pada butir-butir P4, tetapi memadukan nilai-nilai P4 dengan bersumber dari referensi resmi, penyusunan materi dilakukan dengan menggunakan pola spiral. Melalui pendekatan ini, setiap sila dalam Pancasila beserta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya diperkenalkan secara berkelanjutan dan mendalam dipaparkan secara bertahap dan sistematis sesuai dengan tingkat kelas dan jenjang pendidikan.

Seiring dengan perkembangan serta dinamika kehidupan perkembangan masyarakat seiring dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS), mengakibatkan perlunya pembaruan kurikulum mulai dilakukan sejak tahun 2004. Pada saat kurikulum 2004 mulai diperkenalkan dan disosialisasikan ke berbagai sekolah melalui kegiatan *piloting*, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP). Regulasi ini menegaskan bahwa penyusunan kurikulum merupakan kewenangan satuan pendidikan, yang kemudian dikenal sebagai Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Sementara itu, pada Kurikulum 2004, perumusan kurikulum masih sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah sehingga apabila tetap diterapkan akan bertentangan dengan regulasi. Dengan demikian, Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) melakukan pembaruan secara berkesinambungan. Mengacu pada kurikulum 2004, BSNP menetapkan standar isi melalui Permendiknas No. 22 Tahun 2006 serta standar kompetensi lulusan melalui Permendiknas No. 23 Tahun 2006. Kedua peraturan ini menjadi acuan pokok bagi satuan pendidikan dalam menyusun Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).

Dalam regulasi terkait standar isi dan kompetensi lulusan tersebut, mata pelajaran PPKn kembali mengalami perubahan nama menjadi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa penyelenggaraan pendidikan bertujuan mencapai kepentingan bersama. Pendidikan nasional memiliki peran dalam mengembangkan potensi individu, membentuk karakter, serta membangun peradaban bangsa. Tujuannya adalah membimbing peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berpengetahuan, terampil, kreatif, mandiri, serta menyadari hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab (Pasal 3 UU RI No. 20 Tahun 2003).

Proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di Indonesia bertujuan untuk mentransmisikan, menanamkan, mengembangkan, serta melestarikan nilai-nilai luhur Pancasila dan UUD 1945 kepada peserta didik. Dengan demikian, mereka dapat tumbuh sebagai individu sekaligus warga negara yang berkarakter serta memiliki sikap demokratis. Dalam penerapannya, PKn diarahkan untuk membentuk warga negara dengan tiga aspek utama, yaitu:

1. Civics Knowledge, yaitu kecerdasan serta kemampuan berpikir kritis warga negara yang meliputi aspek spiritual, rasional, emosional, dan sosial.
2. Civics Responsibility, yakni pemahaman dan kesadaran terhadap hak serta kewajiban sebagai warga negara yang memiliki tanggung jawab.
3. Civics Participation, yaitu keterampilan untuk terlibat secara aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan dilandasi rasa tanggung jawab,

baik sebagai individu, anggota masyarakat, maupun calon pemimpin di masa depan.

Hakikat mata pelajaran PKn adalah usaha untuk memahami, mengarahkan, serta membina peran warga negara dalam berbagai aspek kehidupan, sehingga terwujud pribadi yang berkarakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Dengan demikian, PKn memiliki fungsi penting dalam menanamkan dan mengembangkan nilai-nilai luhur bangsa, sehingga melalui pembelajaran ini peserta didik diharapkan mampu menginternalisasi, mengamalkan, serta mempertahankan Penerapan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 dalam keseharian.

Adapun Perkembangan Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia

1. Perjalanan PKn pada Masa Sebelum Proklamasi Kemerdekaan

Sebelum Indonesia merdeka, Pendidikan Kewarganegaraan di masa Hindia Belanda dikenal sebagai *Burgerkunde*. Dua buku utama yang digunakan sebagai pedoman pembelajaran adalah *Indische Burgerschapkunde* dan *Rech en Plicht* (Bambang Daroeso dalam Cholisin, 2000: 2.11). Pertama, Pada tahun 1934, P. Tromp menulis buku *Indische Burgerschapkunde* yang Penerbit J.B. Wolters Maatschappij N.V., dengan cabang di Groningen, Den Haag, dan Batavia, mengeluarkan buku dengan cakupan pembahasan yang cukup luas. Isinya meliputi uraian mengenai masyarakat pribumi dan pengaruh Barat, serta berbagai aspek kehidupan seperti aspek sosial, ekonomi, hukum, ketatanegaraan, kebudayaan di Hindia Belanda, hingga permasalahan kehidupan keluarga dalam konteks global.

Selain itu, juga dibicarakan persoalan pertanian, perburuan, pembahasan juga mencakup kaum menengah di bidang industri dan perdagangan, isu-isu terkait

perempuan, perkembangan ketatanegaraan Hindia Belanda dengan lahirnya Dewan Rakyat (Volksraad), aspek hukum beserta penerapannya, pendidikan, kesehatan masyarakat, sistem perpajakan, hingga permasalahan militer yang meliputi militer. Buku lainnya berjudul *Rech en Plicht* (Indische Burgerschappkunde Voor Iedereen) karya J.B. Vortman, yang dipublikasikan oleh G.C.T. van Dorp & Co. N.V. (edisi ketiga, revisi dan diperluas) Pada tahun 1940, buku ini diterbitkan di beberapa kota besar seperti Semarang, Surabaya, dan Bandung. Isi pembahasannya menyoroti badan pribadi yang menguraikan tentang kehidupan masyarakat sejak lahir hingga dewasa, pernikahan dan keluarga, hingga setelah seseorang meninggal dunia.

Selain itu, dibahas pula masalah *bezit* atau objek hukum, seperti kepemilikan (*eigendom*) Topik yang dibahas juga mencakup masyarakat Eropa dan hak atas tanah, termasuk hak agraria. Selain itu, buku ini memuat pembahasan mengenai pembahasan dalam buku tersebut mencakup persoalan mengenai kedaulatan raja, kewajiban warga negara terhadap pemerintahan Hindia Belanda, ketentuan perundang-undangan, serta aspek sejarah mata uang, hingga masalah kesejahteraan.

Pada tahun 1932, Pemerintah Hindia Belanda menetapkan peraturan yang telah mendapat persetujuan Volksraad, yang mewajibkan setiap guru untuk memiliki izin mengajar. Kebijakan ini dianggap kurang tepat karena banyak guru yang mengajar di sekolah partikelir tidak memiliki gelar resmi sebagai guru partikelir. Meskipun demikian, para guru tetap memberikan pendidikan politik di dalam kelas. Hal ini kemudian mendapat penolakan dari guru-guru nasional terhadap aturan tersebut (Cholisin, 2000: 2.12). Diduga bahwa pemerintah Hindia Belanda sebelum adanya reformasi PKn berusaha menanamkan pemahaman kepada rakyat jajahan

mengenai kewajiban serta hak yang harus dipenuhi dalam hubungannya dengan pemerintah kolonial. Harapannya, masyarakat tidak memandang Belanda sebagai musuh, melainkan mendukung pemerintah tersebut dengan penuh kesadaran dalam jangka waktu lama. Akan tetapi, di sekolah partikelir justru terdapat guru-guru yang menanamkan nilai demokrasi serta kesadaran berbangsa dan bernegara, sementara sebagian lainnya hanya memberikan pengetahuan umum. Kondisi ini pada akhirnya mampu menumbuhkan semangat nasionalisme di kalangan masyarakat pribumi.

2. Perkembangan PKn Sesudah Proklamasi kemerdekaan

Cholisin (2000: 2.15 dalam Machful Indra Kurniawan, M.Pd. 2018) Untuk memahami secara lebih mendalam, perlu ditelusuri sejarah serta perkembangan PKn. Oleh karena itu, berikut disajikan uraian lengkap mengenai perjalanan PKn dan perkembangannya, sejarah dan perkembangan PKn dapat ditelusuri secara lebih detail, yang akan disajikan dalam uraian lengkap sebagai berikut:

1. Kewarganegaraan (1957)

Secara tradisional, Pendidikan moral di Indonesia pada hakikatnya bersumber dari nilai-nilai masyarakat, adat, dan ajaran agama awalnya diajarkan melalui pendidikan agama dan pembinaan budi pekerti, tanpa mata pelajaran tersendiri yang secara eksplisit membahasnya. Mata pelajaran Kewarganegaraan baru diperkenalkan pada tahun 1957, dengan fokus pada hak dan kewajiban warga negara. Selain itu, turut diperkenalkan pula mata pelajaran Tata Negara dan Tata Hukum yang berfokus pada pengetahuan tentang negara. Namun, ketiga mata pelajaran tersebut lebih menekankan pada aspek kognitif semata (Cholisin, 2000: 2.15)

2. Civics sebagai pengganti Kewarganegaraan (1959)

Pada tahun 1959, arah politik Indonesia mengalami perubahan setelah keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang menetapkan UUDS 1950 tidak berlaku lagi dan memberlakukan kembali UUD 1945. Perubahan politik tersebut turut berpengaruh pada bidang pendidikan, yang ditandai dengan diperkenalkannya pada jenjang SMP dan SMA diperkenalkan mata pelajaran Civics mencakup materi pembelajaran seperti sejarah Nasional, Proklamasi Kemerdekaan, UUD 1945, Pancasila, serta pidato kenegaraan Presiden dengan tujuan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Sumber ajar terdiri dari buku *Civic Manusia Indonesia Baru* dan *Tujuh Bahan Pokok Indoktrinasi* (TUBAPI), diterapkan melalui metode pembelajaran tertentu.

Pada masa itu, buku pegangan khusus bagi siswa belum tersedia (Cholisin, 2000: 2.15). Materi yang tercantum dalam TUBAPI mencakup materi mencakup kelahiran Pancasila, UUD 1945, serta Manipol, yakni pidato Presiden pada 17 Agustus 1959 berjudul *Penemuan Kembali Revolusi Kita*. Pidato tersebut kemudian diperkuat kembali melalui amanat Presiden pada 17 Agustus 1960 yang menitikberatkan pada empat pokok utama atau *Caturlogi* mencakup empat pokok, isinya meliputi semangat Nasional, Konsepsi Nasional, Keamanan Nasional, dan Perbuatan Nasional. Selain itu, TUBAPI juga memuat JAREK (Jalan Revolusi Kita) serta pidato Presiden RI pada Sidang Umum PBB tanggal 30 September 1960 yang berjudul *Membangun Dunia Baru (The World A new)* yang kemudian dipandang sebagai salah satu dokumen penting dalam sejarah politik Indonesia tonggak lahirnya Gerakan Non-Blok (GNB). Selanjutnya,

terdapat pula MANIPOL-USDEK dan Amanat Presiden mengenai Pembangunan Semesta Berencana yang disampaikan dalam sidang DEPERNAS. Dinyatakan pada 9 Januari 1960 (Cholisin, 2000: 2.16).

3. Kewargaan Negara (1962)

Menurut Cholisin (2000: 2.16), pada tahun 1962 istilah *Civics* diganti dengan Kewargaan Negara atas inisiatif Dr. Sahardjo, S.H., yang menjabat sebagai Menteri Kehakiman pada masa itu. Pergantian istilah ini dimaksudkan untuk membentuk individu yang berkarakter baik melalui pendidikan. Pada tahun 1965 terjadi pemberontakan G 30S/PKI yang memicu perubahan dalam pemerintahan. Penyerahan Surat Perintah 11 Maret 1966 (Supersemar) oleh Presiden Soekarno kepada Letnan Jenderal Soeharto menandai awal berdirinya Orde Baru. Pemerintah menekankan penerapan UUD 1945 secara utuh. Bersamaan dengan itu, kebijakan pendidikan diperbarui. Keputusan Mendikbud No. 31 Tahun 1967 menetapkan bahwa *Civics* memuat materi: Pancasila, UUD 1945, Ketetapan MPRS, dan informasi tentang PBB (Cholisin, 2000: 2.16).

4. Pendidikan Kewargaan Negara (1968)

Dengan Kurikulum 1968, mata pelajaran Kewargaan Negara yang diperkenalkan pada 1962 dikembangkan menjadi Pendidikan Kewargaan Negara (PKn). Ali Emran (1976: 4) menyatakan bahwa materi PKn disusun bertahap: di SD berfokus pada Pengetahuan Kewargaan Negara, Sejarah Indonesia, dan Ilmu Bumi; di SMP pada Pancasila dan Ketetapan MPRS; sedangkan di SMA menitikberatkan pada pasal-pasal UUD 1945 yang berkaitan dengan Tata Negara, Sejarah, Ilmu Bumi, dan Ekonomi. Sejak tahun 1970, PKn tidak berdiri

sendiri, melainkan dilebur ke dalam mata pelajaran lainnya seperti pelajaran IPS bersama sejumlah disiplin lain, termasuk Sejarah, Ekonomi, Sosiologi, Antropologi Budaya, Hukum, dan Ilmu Bumi.

5. Pendidikan Kewargaan Negara (PKN) (1972)

Pada 1972, di Tawangmangu, Surakarta, diselenggarakan Seminar Nasional tentang Pengajaran dan Pendidikan Civics. Salah satu hasil penting dari seminar ini adalah penggunaan istilah Ilmu Kewargaan Negara (IKN) sebagai pengganti Civics, sementara Pendidikan Kewargaan Negara (PKn) menggantikan istilah Civics Education. IKN dipandang sebagai suatu disiplin ilmu yang memberikan uraian mengenai peranan warga negara, sementara PKn berfungsi sebagai sebuah program pendidikan, IKN berfungsi untuk membina peran tersebut. Oleh karena itu, IKN memiliki sifat teoritis, sedangkan PKn bersifat praktis. Meskipun berbeda, keduanya saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan, sebab Perkembangan Pendidikan Kewargaan Negara (PKn) sangat dipengaruhi oleh kemajuan Ilmu Kewargaan Negara (IKN) (Cholisin, 2000: 2.17). Cholisin menekankan bahwa hasil dari Seminar Tawangmangu memiliki dampak besar terhadap perkembangan PKn selanjutnya. Hal ini terlihat pada masa berlakunya Kurikulum 1975, ketika PKn diubah menjadi mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP). Meskipun demikian, baik IKN maupun PKn tetap diajarkan dalam bentuk mata kuliah pada Program S1 Pendidikan Moral Pancasila (PMP) yang diajarkan di IKIP dan FKIP yang diselenggarakan berdasarkan Kurikulum 1982. Pemberian mata kuliah yang dibahas bertujuan agar mahasiswa mampu menguasai bahan kajian yang lebih mendalam tentang bidang studi Pendidikan Moral Pancasila (PMP) (Depdikbud Ditjen Dikti, 1982:

52–55). Oleh karena itu, secara implisit, istilah IKN dan PKn mengandung pengertian tertentu. dianggap sejalan atau berkaitan erat dengan mata pelajaran PMP tetap terkandung di dalam PMP.

6. Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) (1989)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SPN), khususnya Bab IX Pasal 39, dijelaskan beberapa ketentuan terkait kurikulum. Kurikulum dipahami sebagai kumpulan materi kajian serta pelajaran yang disusun dengan tujuan untuk mencapai sasaran pendidikan nasional pada setiap jenjang pendidikan. Di samping itu, setiap kurikulum wajib memuat mata pelajaran Pendidikan Pancasila, Pendidikan Agama, serta Pendidikan Kewarganegaraan. Khusus pada tingkat pendidikan dasar, kurikulum setidaknya harus memuat bahan kajian dan mata pelajaran tertentu sebagai fondasi pembelajaran. Mata pelajaran yang tercakup meliputi Mata pelajaran mencakup Pendidikan Pancasila, Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, keterampilan membaca dan menulis, Matematika beserta kemampuan berhitung, IPTEK, Ilmu Bumi, Sejarah Nasional dan Sejarah Umum, keterampilan tangan dan seni, Pendidikan Jasmani dan Kesehatan, Menggambar, serta Bahasa Inggris.

7. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Kurikulum 1994, yang disusun sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989, menggabungkan Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan menjadi satu mata pelajaran yang disebut Pendidikan Pancasila dan

Kewarganegaraan (PPKn). tersebut menekankan sejumlah fungsi pokok PPKn, antara lain:

- a. Memelihara sekaligus mengembangkan nilai-nilai moral Pancasila secara terbuka dan dinamis, sehingga nilai-nilai tersebut tetap relevan dalam menjawab tantangan perkembangan masyarakat, tanpa kehilangan identitas bangsa Indonesia yang bebas, utuh, dan memiliki kedaulatan.
- b. Membentuk dan membimbing siswa agar berkembang menjadi bangsa Indonesia seutuhnya dengan kesadaran politik, hukum, dan konstitusional yang berlandaskan Pancasila dalam kerangka Negara Indonesia.
- c. Menumbuhkan pemahaman serta kesadaran mengenai relasi antara warga negara dengan negara maupun antarsesama warga, sekaligus memberikan bekal pengetahuan dasar bela negara agar peserta didik mampu memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban dengan kesadaran dan tanggung jawab.
- d. Memberikan bekal kepada peserta didik agar memiliki sikap dan perilaku sehari-hari yang berlandaskan pada nilai-nilai moral Pancasila serta UUD 1945.

Pendidikan Kewarganegaraan, atau yang dikenal dalam bahasa Inggris sebagai civic education, didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari hubungan antarindividu dalam sebuah kelompok, dengan tujuan memahami peran dan tanggung jawab warga negara atau organisasi, serta hubungan antara individu dengan negara. Secara ringkas, Pendidikan Kewarganegaraan dapat dipahami sebagai suatu bentuk pendidikan yang berupaya memadukan aspek-aspek penting seperti penerapan nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan masyarakat madani dilakukan melalui proses pembelajaran yang menekankan partisipasi aktif dan kesetaraan, sehingga berlangsung secara demokratis.

Berdasarkan Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi, Pendidikan Kewarganegaraan ditempatkan sebagai komponen integral dalam sistem pendidikan nasional. Standar isi ini menekankan pentingnya membentuk Individu sebagai warga negara yang memahami dan menjalankan hak dan kewajibannya, sambil berkembang menjadi pribadi cerdas, terampil, berbudi pekerti luhur, dan berpegang pada nilai-nilai Pancasila serta konstitusi UUD 1945. Selaras dengan itu, Sunarso dkk. (2008:1 dalam Machful Indra Kurniawan, M.Pd., 2018) menegaskan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan Memiliki tujuan pokok untuk mengembangkan kecerdasan bangsa dengan menggunakan pendekatan pendidikan yang berfokus pada nilai-nilai.

Sesuai Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006, ruang lingkup materi Pendidikan Kewarganegaraan tergolong dalam standar isi, dengan materi yang mencakup persatuan dan kesatuan bangsa, norma dan peraturan hukum, perlindungan hak asasi manusia, kebutuhan warga negara, konstitusi negara, sistem politik dan kekuasaan, nilai-nilai Pancasila, serta berbagai isu global.

Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan menyiapkan peserta didik dengan kompetensi yang esensial untuk kehidupan bermasyarakat. Di ranah nasional, mata pelajaran ini diharapkan membentuk peserta didik yang berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menyelesaikan persoalan kewarganegaraan. Peserta didik diarahkan agar mampu berpartisipasi secara cerdas dan bertanggung jawab dalam kegiatan sosial maupun kenegaraan. PKn juga berfungsi mengembangkan pribadi yang positif dan demokratis sesuai dengan karakter bangsa Indonesia, sehingga peserta didik dapat menjalin hubungan harmonis dengan bangsa lain. Lebih jauh, PKn mempersiapkan peserta didik agar dapat berinteraksi di tingkat global, baik langsung maupun melalui

teknologi informasi dan komunikasi (Sunarso dkk., 2008:11). Fungsi utama PKn adalah membentuk warga negara yang cerdas, terampil, dan berkarakter, menumbuhkan kesetiaan terhadap bangsa dan negara, serta menanamkan kebiasaan berpikir dan bertindak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Dengan demikian, PPKn fokus pada pembentukan karakter warga negara agar peserta didik mampu memahami serta menjalankan hak dan kewajibannya, dan menjadi warga negara Indonesia yang terampil dan cerdas sesuai nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.

a. PPKn Menurut KTSP

Pendidikan Kewarganegaraan, yang sering disebut *civic education*, merupakan suatu pendekatan pendidikan yang berfokus pada pembentukan warga negara demokratis sesuai dengan konstitusi (Kosasih Djahiri, 2006:9). PKn dirancang dengan tujuan sistematis untuk *humanizing*, *civilizing*, dan *empowering* peserta didik, sehingga mereka dapat menumbuhkan kemampuan dan sikap sebagai warga negara yang bertanggung jawab dan patuh terhadap norma hukum serta kewajiban konstitusional negara.

Menurut KTSP 2006, Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dirancang untuk mengembangkan tiga dimensi utama: pengetahuan, keterampilan, dan nilai. Dimensi tersebut sejalan dengan tujuan PKn, yaitu membentuk warga negara yang ideal, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta memiliki kompetensi dan nilai-nilai yang sesuai dengan prinsip PKn. Warga negara yang demikian diharapkan mampu berpartisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat yang demokratis. Materi PKn mencakup persatuan dan kesatuan bangsa, norma, hukum dan peraturan, hak asasi

manusia, kebutuhan warga negara, konstitusi, kekuasaan dan politik, nilai-nilai Pancasila, serta isu global.

b. PPKn Menurut kurikulum 2013(K13)

Menurut Kurikulum 2013 (K13), PPKn merupakan Mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) mengalami penyempurnaan dari penerapan sebelumnya dalam Kurikulum 2006. Upaya penyempurnaan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek., antara lain:

1. Pancasila diposisikan sebagai dasar dan pedoman utama dalam mencapai kompetensi serta pengelolaan materi PPKn.
2. UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan komitmen terhadap NKRI terintegrasi dalam PPKn sebagai media pembentukan karakter warga negara yang sesuai Pancasila.

Dalam Kurikulum 2013, ruang lingkup PPKn mencakup aspek-aspek utama seperti Pancasila berfungsi sebagai dasar negara, ideologi, sekaligus pedoman hidup bangsa, sedangkan UUD 1945 merupakan konstitusi tertulis yang menjadi landasan hukum dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara NKRI dipahami sebagai bentuk negara yang telah menjadi kesepakatan final, sedangkan Bhinneka Tunggal Ika menjadi falsafah persatuan. Nilai-nilai tersebut menjadi dasar sekaligus memberi warna pada keberagaman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sejak Tahun Pelajaran 2013/2014, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mulai menerapkan Kurikulum 2013 Salah satu perubahan utama dalam kurikulum ini adalah restrukturisasi mata pelajaran PKn diubah menjadi Pendidikan Pancasila dan

Kewarganegaraan (PPKn) (Abdullah, 2007). Kebijakan ini mencakup beberapa aspek, antara lain:

1. Perubahan nama mata pelajaran dari PKn menjadi PPKn.
2. PPKn dijadikan bagian integral dari kelompok mata pelajaran yang berfokus pada penguatan nilai-nilai kebangsaan.
3. Penetapan Standar Kompetensi, Kompetensi Dasar, Indikator PPKn ditetapkan secara nasional dengan menekankan nilai-nilai moral Pancasila, norma dan nilai UUD 1945, semangat Bhinneka Tunggal Ika, serta wawasan dan komitmen terhadap NKRI
4. Pengembangan peserta didik difokuskan pada enam dimensi kewarganegaraan, yaitu pengetahuan, sikap, keterampilan, keteguhan, komitmen, dan kompetensi.
5. penerapan berbagai model pembelajaran disesuaikan dengan karakter PPKn untuk membentuk peserta didik menjadi warga negara yang cerdas dan berkarakter utuh.
6. Pengembangan model penilaian yang mencakup proses dan hasil belajar PPKn.

Di dalam Kurikulum 2013, mata pelajaran PKn diprioritaskan sebagai mata pelajaran wajib. Pada tingkat Sekolah Dasar (SD), nama mata pelajaran ini diubah dari Pendidikan Kewarganegaraan menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Begitu pula pada tingkat SMP, mata pelajaran ini mengalami perubahan nama yang sama. Sementara itu, Pada tingkat SMA, mata pelajaran PKn tetap menggunakan istilah Pendidikan Kewarganegaraan. Berdasarkan Bahan Uji Publik Pengembangan Kurikulum 2013 dari Kemendikbud, terjadi penyesuaian alokasi waktu untuk mata

pelajaran PKn, yakni pada tingkat SD dan SMP meningkat dari dua jam menjadi tiga jam pelajaran., sedangkan untuk SMA tetap dua jam pelajaran.

c. PPKn Menurut Kurikulum Merdeka

Nadiem Makarim menjelaskan bahwa gagasan Merdeka Belajar memiliki tiga poin utama, yaitu pemanfaatan teknologi untuk percepatan pembelajaran, pengakuan keberagaman sebagai esensi, dan pengembangan profil Pelajar Pancasila (Satria et al., 2022). Poin pertama menekankan peran teknologi, informasi, dan komunikasi dalam pendidikan. Namun yang menarik adalah poin kedua dan ketiga, yang berkaitan dengan PPKn, yakni penguatan keberagaman sebagai esensi. Hal ini mencakup pengakuan terhadap beragam minat dan kemampuan siswa, sehingga penilaian kinerja siswa tidak hanya didasarkan pada angka akademik, tetapi juga mempertimbangkan berbagai aktivitas lain, termasuk kegiatan ekstrakurikuler (Kemenristekdikti, 2022).

Kearifan lokal menjadi unsur penting dalam proses pembelajaran, karena setiap siswa cenderung lebih mudah memahami materi apabila dikaitkan dengan konteks lokal. Hal ini memungkinkan siswa melihat seluruh mata pelajaran dan materi secara kontekstual. Terkait dengan Profil Pelajar Pancasila, Mendikbud Nadiem Makarim menyampaikan bahwa salah satu mandat Presiden adalah melakukan penyesuaian kurikulum guna mewujudkan profil pelajar Indonesia. Sebagai tindak lanjut, Kemendikbud menetapkan enam indikator yang menjadi acuan dalam pembentukan Profil Pelajar Pancasila (Setiyaningsih & Wiryanto, 2022).

Enam profil yang dikembangkan dalam pendidikan karakter adalah sebagai berikut:

1. Bernalar Kritis yaitu siswa memiliki kemampuan untuk berpikir kritis dalam menyelesaikan masalah, yang terkait dengan aspek kognitif.
2. Kemandirian, yaitu kondisi di mana siswa termotivasi secara mandiri untuk mengembangkan kemampuannya, mampu mencari pengetahuan sendiri, dan tetap terdorong untuk belajar.
3. Kreativitas yaitu siswa mampu menciptakan hal-hal baru, berinovasi secara mandiri, serta menunjukkan apresiasi terhadap kesenian dan budaya (Marisa, 2021).
4. Gotong royong yaitu siswa memiliki kemampuan berkolaborasi, keterampilan lunak yang penting untuk bekerja dalam tim di masa depan.
5. Kebinekaan global yaitu siswa diajarkan Mampu mencintai keberagaman budaya, agama, dan ras, baik di dalam negeri maupun di tingkat global, sekaligus menegaskan peran mereka sebagai warga dunia.
6. Berakhlak mulia, yang menekankan moralitas, spiritualitas, dan etika, menjadi fokus utama. Pendidikan karakter menjadi salah satu pilar utama, sebagaimana ditekankan oleh Mendikbud. Metode *project based learning* diterapkan untuk melatih jiwa gotong-royong dan kreativitas siswa, dengan pendekatan yang mendorong mereka tidak hanya mempelajari materi dan diuji, tetapi juga menciptakan karya. Mendikbud menekankan pentingnya bertanya, mencoba, dan berkarya sebagai bagian dari transformasi pembelajaran di kelas (Raharjo, 2020).

SMP Usdatara Kota Sorong Merupakan sekolah Swasta yang terakreditasi “C” yang dimana akan menjadi tempat penelitian saya. Namun dalam proses

pembelajarannya Sekolah ini masih menggunakan kurikulum 2013 untuk siswa kelas IX (sembilan) di tahun 2025, dan waktu pelaksanaan pembelajarannya pada pagi hari selama enam hari dalam seminggu

Namun, pemerintah Kota Sorong telah mengeluarkan Peraturan Wali Kota Sorong Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Merdeka Belajar, yang mendorong implementasi Kurikulum Merdeka di seluruh sekolah dan Hingga Mei 2023, sekitar 80% sekolah di Kota Sorong telah menerapkan Kurikulum Merdeka (dalam KompasTv Sorong). Dan untuk saat ini SMP Usdatara sudah melaksanakan kurikulum Merdeka yang dimana baru kelas VII dan VIII di tahun 2024.

2.5. Penelitian Yang Relevan

- a. Rini Yuliani (2013), melalui penelitiannya berjudul “Implementasi Nilai-Nilai Demokrasi dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMP Negeri 3 Gringsing Batang”, ditemukan bahwa pembelajaran PKn menekankan nilai-nilai demokrasi, termasuk toleransi, kerja sama, kebebasan menyampaikan pendapat, kebebasan berkelompok, menghargai orang lain, percaya diri, dan kesadaran akan perbedaan. Nilai-nilai tersebut diaplikasikan melalui metode seperti diskusi, ceramah, tanya jawab, dan penugasan, sehingga siswa memiliki ruang untuk mengemukakan ide atau pendapat. Guru menekankan sikap demokratis sejak awal pembelajaran dan memberi contoh penerapan hak dan kewajiban secara proporsional. Faktor-faktor yang memengaruhi implementasi nilai demokrasi dalam pembelajaran PKn ini meliputi faktor pendorong dan penghambat, yaitu faktor-faktor yang mendorong penerapan nilai-nilai demokrasi dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMP Negeri 3 Gringsing Batang meliputi:

1. Perubahan kurikulum yang mengintegrasikan pendidikan karakter ke dalam setiap mata pelajaran, yang memberikan dampak positif terhadap pelaksanaan pembelajaran PKn.
2. Ketersediaan sarana dan prasarana, seperti LCD, laptop, serta buku referensi yang digunakan guru, yang menjadi penunjang utama keberhasilan proses pembelajaran.
3. Budaya sekolah yang diterapkan di SMP Negeri 3 Gringsing Batang berfungsi sebagai teladan, mengingat sekolah memiliki tanggung jawab utama dalam meningkatkan mutu pendidikan.

Sementara itu, faktor-faktor yang menghambat implementasi nilai-nilai demokrasi dalam pembelajaran PKn antara lain:

1. Kurangnya dukungan dari orang tua, karena kesibukan bekerja menyebabkan anak kurang mendapat bimbingan sehingga memengaruhi kemampuan belajar.
 2. Lingkungan masyarakat, di mana perilaku negatif di sekitar siswa dapat memengaruhi sikap, perilaku, dan prestasi mereka secara buruk.
 3. Keterbatasan biaya, karena terkadang guru harus menanggung biaya sendiri untuk menyusun media pembelajaran.
 4. Perbedaan individu, yaitu variasi kemampuan antar siswa yang tidak bisa dihindari karena setiap siswa memiliki kapasitas yang berbeda-beda.
- b. Berti Damayanti (2016), melalui penelitiannya yang berjudul “Penelitian mengenai *“Implementasi Pendidikan Demokrasi dalam Pembelajaran IPS di SMP Diponegoro Majenang Cilacap*” menunjukkan bahwa penerapan pendidikan demokrasi di sekolah ini didukung oleh budaya sekolah serta kurikulum yang

diterapkan. Sekolah membangun kebiasaan, kegiatan khas, dan aturan yang menekankan pengamalan nilai-nilai demokrasi. Kurikulum yang diterapkan pun mencakup tujuan, materi, proses, serta evaluasi pembelajaran yang sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Adapun nilai-nilai demokrasi yang dikembangkan dalam pembelajaran IPS mencakup kebebasan, kesetaraan, kebersamaan, saling percaya, penyelesaian masalah secara damai, toleransi, serta partisipasi. Penerapan pendidikan demokrasi dalam pembelajaran IPS tersebut terwujud melalui berbagai kegiatan, yaitu:

1. Perencanaan pembelajaran: meliputi penyusunan tujuan, materi, metode, media, serta evaluasi dilakukan secara implisit dengan berorientasi pada nilai-nilai demokrasi.
2. Pelaksanaan pembelajaran: Dilakukan dengan menggunakan metode yang mendukung praktik nilai-nilai demokrasi, menghubungkan materi IPS dengan nilai-nilai demokrasi, serta memberikan pemahaman melalui contoh penerapan nilai demokrasi dalam masyarakat.
3. Evaluasi pembelajaran dilaksanakan melalui pengamatan sikap siswa, dengan menggunakan lembar penilaian sikap sebagai pedoman, sehingga evaluasi menekankan pada pengembangan dan implementasi nilai-nilai demokrasi.

Faktor yang memengaruhi keberhasilan pelaksanaan pendidikan demokrasi antara lain:

1. Faktor pendukung: Penerapan metode pembelajaran yang tepat, adanya interaksi harmonis antara guru dan siswa, pemberian motivasi serta penghargaan oleh guru, dan budaya sekolah yang kondusif menjadi unsur yang mendukung.

2. Faktor penghambat: Hambatan yang muncul antara lain kurangnya rasa percaya diri pada sebagian siswa, rendahnya keseriusan dalam belajar, keterbatasan media pembelajaran, serta masih ditemukannya praktik bullying.
- c. Nungki Dwi Abshita Rini (2017), melalui penelitiannya yang berjudul *“Implementasi Nilai-Nilai Demokrasi melalui Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan”* menjelaskan bahwa pembelajaran PKn di SDN se-Gugus 3 Patuk, Kecamatan Patuk Gunung Kidul menanamkan nilai-nilai demokrasi seperti toleransi, kerja sama, nilai-nilai demokrasi yang diterapkan mencakup kebebasan berpendapat, saling menghormati, dan rasa percaya diri. Penerapannya dilakukan melalui metode ceramah, diskusi, tanya jawab, dan penugasan serta demonstrasi, yang memberi ruang bagi siswa untuk mengekspresikan pendapat mereka. Guru berperan sebagai pembimbing dalam membentuk sikap demokratis pada siswa, sehingga Nilai-nilai demokrasi dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan nilai-nilai demokrasi melalui pembelajaran PKn di SDN se-Gugus 3 Patuk, Gunungkidul, meliputi:
1. Sarana dan prasarana: Guru memanfaatkan berbagai fasilitas pendukung, seperti LCD, media gambar, dan buku pelajaran sebagai sumber referensi.
 2. Budaya sekolah: Budaya yang berkembang di sekolah menekankan pentingnya kedisiplinan.
 3. Kepemimpinan: Kepala sekolah menunjukkan kepemimpinan yang dapat dijadikan teladan, mengingat tanggung jawab besar sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan.

Faktor-faktor yang menghambat implementasi nilai-nilai demokrasi di sekolah ini antara lain:

- a. Kurangnya dukungan orang tua: Kesibukan orang tua menyebabkan anak kurang memperoleh bimbingan sehingga mengalami kesulitan dalam belajar.
- b. Lingkungan masyarakat: Perilaku negatif di sekitar masyarakat dapat memengaruhi pembentukan sikap dan perilaku siswa secara buruk.
- c. Perbedaan individu: Variasi kemampuan antar siswa menimbulkan perbedaan dalam proses belajar.

Solusi untuk pelaksanaan nilai-nilai demokrasi melalui pembelajaran PKn di sekolah ini mencakup:

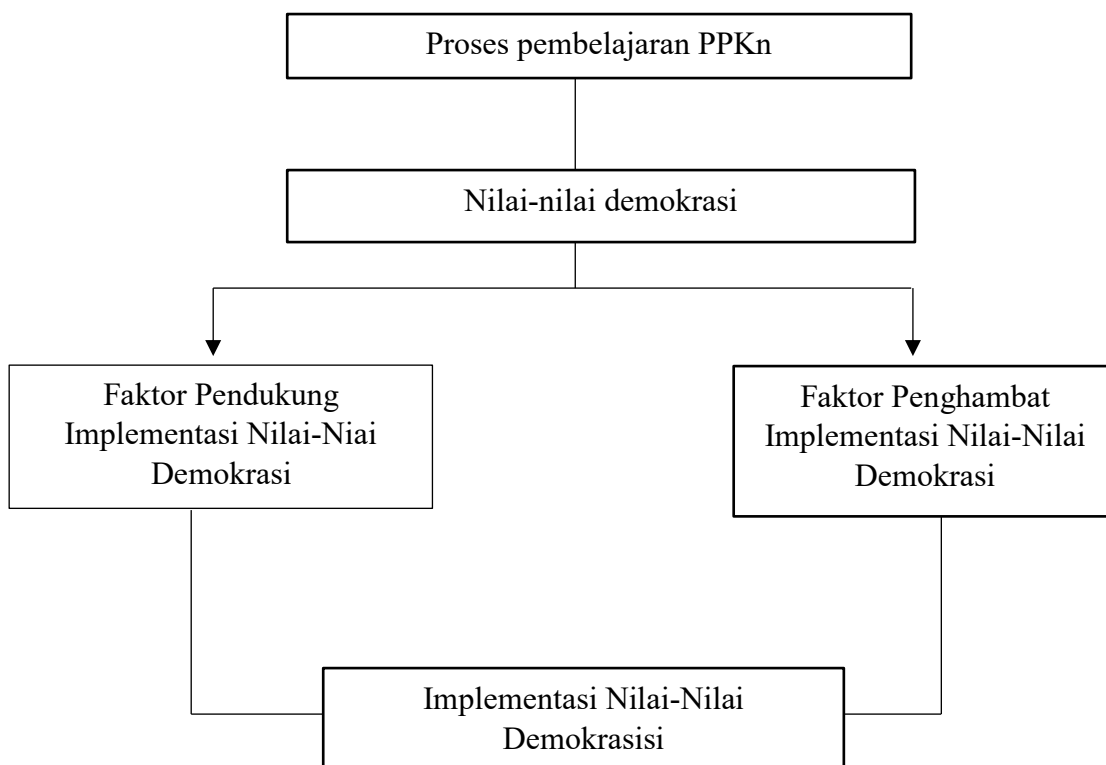
- a. Kesadaran orang tua: Orang tua diharapkan lebih memperhatikan siswa baik di dalam maupun di luar sekolah.
- b. Keterlibatan masyarakat: Masyarakat perlu menciptakan lingkungan yang kondusif dan berperan dalam mengawasi siswa di luar sekolah.
- c. Komunikasi yang baik: Komunikasi yang efektif menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan pendidikan.

2.6. Novelty/Kebaruan Penelitian

Kebaruan dari penelitian tentang implementasi nilai-nilai demokrasi dalam mata pelajaran PPKn di Sekolah menengah pertama (SMP) Usdatara Kota Sorong ini lebih di fokuskan pada praktik lokal di dalam lingkup sekolah, misalnya, siswa melakukan gotong royong dan musyawarah bersama siswa. dan bagaimana siswa terlibat dalam demokrasi disekolah, termasuk penggunaan teknologi digital dalam pembelajaran.

2.7 Kerangka Berpikir

Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana pendidikan demokrasi diimplementasikan melalui mata pelajaran PPKn. Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai fokus penelitian, disajikan skema bagan kerangka berpikir berikut:



Gambar 2.7 Karangka berpikir

2.8 Definisi Operasional Variabel

Penelitian ini menetapkan variabel bebas sebagai faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat implementasi nilai-nilai demokrasi, sedangkan variabel terikatnya adalah penerapan nilai-nilai demokrasi. Penjelasan mengenai definisi operasional setiap variabel disajikan sebagai berikut:

1. Faktor Pendukung

Kondisi atau aspek yang membantu serta meningkatkan keberhasilan suatu kegiatan. Dalam konteks SMP Usdatara Kota Sorong, faktor pendukung implementasi nilai-nilai demokrasi meliputi ketersediaan sarana dan prasarana, aktivitas ekstrakurikuler, serta keteladanan guru.

2. Faktor Penghambat

Hambatan atau kendala yang dapat menurunkan efektivitas pelaksanaan kegiatan dan menghalangi tercapainya tujuan. Dalam penelitian ini, faktor penghambat yang ditemui adalah perbedaan individual siswa.

a. Implementasi

Proses penerapan atau pelaksanaan suatu kebijakan maupun peraturan agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai.

b. Nilai-Nilai Demokrasi

Prinsip yang dijadikan pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, yang menekankan pada kesetaraan hak serta kewajiban, serta perlakuan yang adil bagi setiap warga negara.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian menggunakan penelitian pendekatan kualitatif dengan menguraikan serta menjelaskan suatu kejadian, penelitian dilakukan Untuk memahami bagaimana guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan berperan dalam penerapan nilai-nilai demokrasi melalui mata pelajaran PPKn di SMP Usdatara Kota Sorong. Sugiyono (2018:2) Menjelaskan bahwa penelitian merupakan metode ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data dengan tujuan tertentu, yang dilakukan secara rasional, empiris, dan sistematis sesuai kaidah keilmuan (dalam Suwarsa, 2021).

3.2 Lokasi dan Waktu Peneliti

Lokasi penelitian merupakan tempat berlangsungnya kegiatan penelitian, dan dalam penelitian ini dilaksanakan di SMP Usdatara Kota Sorong yang terletak di Jln. Arteri Permai Km 10, Distrik Sorong Utara, Kelurahan Sawagumu, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, sesuai dengan judulnya, yaitu tentang implementasi nilai-nilai demokrasi dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) bagi peserta didik di SMP Usdatara kota sorong sehingga meningkatkan nilai-nilai demokrasi di SMP Usdatara. Pelaksanaan penelitian ini akan di laksanakan dalam rentang waktu 2 Minggu, pada semester ganjil tahun pelajaran tahun 2025/2026.

3.3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian meliputi individu atau entitas yang dimintai keterangan dan berperan dalam menyampaikan informasi mengenai kondisi dan situasi di lokasi penelitian. Subjek memiliki posisi strategis karena menjadi sumber data utama bagi variabel yang diteliti. Dalam

penelitian kualitatif, subjek atau responden biasanya disebut informan, yaitu pihak yang menyediakan informasi yang diperlukan peneliti terkait pelaksanaan penelitian (Fitrah & Luthfiyah, 2017:152, dalam Yahshinta Dianingrum, 2021).

Subjek penelitian ini meliputi siswa kelas VII, VIII, IX, serta guru kelas di SMP Usdatara Kota Sorong. Pemilihan subjek dilakukan dengan teknik purposive sampling, yang diterapkan ketika peneliti menentukan subjek sesuai dengan tujuan penelitian. Dengan demikian, sampel ditetapkan berdasarkan kriteria tertentu terkait ‘Implementasi nilai-nilai demokrasi dalam mata pelajaran PPKn.

Objek penelitian adalah aspek yang diselidiki dalam suatu kegiatan penelitian. Secara umum, objek penelitian mencakup topik permasalahan yang dikaji, baik berupa isu maupun persoalan yang diteliti, sehingga memiliki cakupan luas selama masih relevan dengan topik penelitian (Mukhtazar, 2020: 45–46, dalam Yahshinta Dianingrum, 2021). Objek penelitian pada penelitian ini adalah ‘Implementasi Nilai-Nilai Demokrasi dalam Pembelajaran PPKn’ di SMP Usdatara pada tahun pelajaran 2025/2026.

4.4 Sumber Data

Sutopi (2006: 56-57) menyatakan bahwa sumber data merupakan tempat atau media di mana data dikumpulkan melalui sumber data dapat berupa manusia, artefak, maupun dokumen sesuai dengan metode yang digunakan. Dalam penelitian ini, sumber data dibedakan menjadi data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, yang mencakup:

1. Kepala sekolah SMP Usdatara Kota Sorong.
2. Guru PPKn SMP Usdatara Kota Sorong.
3. Sejumlah siswa kelas VII, VIII, IX SMP Usdatara Kota Sorong.

2. Data Sekunder

Dalam penelitian ini, data sekunder merupakan data yang diperoleh bukan secara langsung dari sumber aslinya. Sumber-sumber data sekunder yang dimanfaatkan antara lain sumber tertulis berupa buku, jurnal ilmiah, dan dokumen resmi dari pihak terkait yang berkaitan dengan penerapan nilai-nilai demokrasi melalui pembelajaran PPKn di SMP Usdatara Kota Sorong dan data sekunder juga diperoleh dari sekolah, berupa daftar nama siswa beserta jumlah total siswa.

3.5 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian digunakan sebagai sarana pengumpulan data. Pada penelitian ini, pengumpulan data dilakukan secara langsung di lapangan, kemudian dianalisis untuk menarik kesimpulan. Beberapa instrumen yang digunakan mencakup lembar observasi, pedoman wawancara, serta dokumen terkait.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2013:224), teknik pengumpulan data merupakan langkah strategis dalam penelitian karena tujuan utama penelitian adalah memperoleh data. Agar data yang diperoleh dari lapangan valid, peneliti perlu menggunakan teknik tertentu. Dalam penelitian ini, penulis menerapkan beberapa teknik sebagai berikut:

1. Wawancara

Sugiyono (2018:103) menyatakan bahwa wawancara merupakan metode pengumpulan data yang terutama digunakan pada studi pendahuluan untuk menentukan fokus masalah penelitian. Wawancara cocok dilakukan ketika jumlah responden sedikit dan peneliti ingin mendapatkan informasi lebih mendalam mengenai karakteristik mereka.

Teknik ini termasuk pengumpulan data kualitatif melalui komunikasi langsung antara peneliti dan informan agar diperoleh informasi yang valid. Oleh karena itu, penulis menerapkan wawancara tatap muka untuk memperoleh informasi terkait fenomena sosial yang ada. Informan penelitian terdiri dari kepala sekolah, guru PPKn, dan siswa kelas VII, VIII, IX SMP Usdatara Kota Sorong. Wawancara dilakukan secara santai agar pertanyaan dapat dipahami dengan mudah, dengan tujuan mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat penerapan nilai-nilai demokrasi.

2. Obsevasi

Observasi adalah metode pengamatan langsung terhadap fenomena yang berlangsung dalam pembelajaran kelas VII, VIII dan IX SMP Usdatara Kota Sorong terkait “Implementasi Nilai-Nilai Demokrasi melalui Mata Pelajaran PPKn”. Menurut Nasution yang dikutip dalam buku Sugiyono, observasi menjadi dasar ilmu pengetahuan karena ilmuwan mengumpulkan data berupa fakta melalui pengamatan. Pengumpulan data ini kerap dibantu alat-alat canggih agar objek kecil maupun jauh dapat diamati dengan jelas. Bagi penulis, observasi termasuk metode pengumpulan data yang lazim dalam penelitian kualitatif. Dengan demikian, penulis melakukan pengamatan penerapan nilai-nilai demokrasi dalam pembelajaran PPKn di SMP Usdatara Kota Sorong dan mencatat poin-poin penting dari hasil pengamatan.

3. Dokumentasi

Sugiyono menyatakan bahwa dokumentasi merupakan catatan tentang peristiwa yang sudah terjadi, yang dapat berbentuk gambar, tulisan, atau karya monumental seseorang (Sinulingga et al., 2018). Penulis menerapkan metode dokumentasi sebagai cara mengumpulkan data dari dokumen tertulis. Proses

dokumentasi dilakukan dengan memotret hal-hal yang terkait dengan “Implementasi Nilai-Nilai Demokrasi dalam Mata Pelajaran PPKn di SMP Usdata Kota Sorong’. Teknik ini melibatkan pengumpulan data untuk kemudian dianalisis dan ditelaah. Data yang dikumpulkan mencakup daftar nama siswa beserta jumlah siswa.

3.7 Teknik Analisis Data

Sugiyono (2019) menyatakan bahwa analisis data pada penelitian kualitatif dilakukan selama pengumpulan data maupun setelah data terkumpul sepenuhnya dalam periode tertentu. Selama wawancara, peneliti sudah mulai meninjau jawaban dari responden. Metode analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini antara lain:

1. Reduksi Data

Proses reduksi berlangsung secara berkelanjutan bahkan sebelum seluruh data Data yang telah terkumpul, sebagaimana ditunjukkan oleh kerangka konseptual penelitian, rumusan masalah, dan pendekatan pengumpulan data, kemudian direduksi. Reduksi data mencakup kegiatan merangkum, mengkode, menelusuri tema, dan membentuk kelompok-kelompok data Proses ini dilakukan melalui seleksi ketat, ringkasan, dan interaksi antara reduksi data, kesimpulan, serta penyajian data. Reduksi data bersifat iteratif, berulang, dan interaktif (Rijali, 2019).

2. Penyajian Data

Penyajian data bertujuan untuk menyusun informasi agar penarikan kesimpulan dan pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan mudah. Dalam

konteks penelitian kualitatif, data dapat disajikan melalui teks naratif, catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan, atau bagan. Format-format ini memungkinkan informasi tersaji secara sistematis dan memudahkan interpretasi. pemahaman fenomena, menilai kesesuaian kesimpulan, atau melakukan analisis ulang jika diperlukan (Rijali, 2019). Data disajikan dalam bentuk teks, didukung bagan dan gambar untuk memperkuat hasil, karena data kualitatif lebih tepat disajikan secara naratif daripada angka.

3. Penarikan Kesimpulan

Menurut Miles dan Huberman, langkah berikutnya adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi. Sejak awal pengumpulan data, peneliti berusaha memahami makna simbol, mencatat pola, penjelasan, serta hubungan sebab-akibat. Dari proses ini, kesimpulan awal yang bersifat umum dibuat dan kemudian disempurnakan menjadi lebih spesifik dan rinci. Kesimpulan komprehensif diharapkan tercapai setelah seluruh data dikumpulkan (Agesty, 2022). Setelah pemilihan, pengumpulan, dan kajian data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, peneliti dapat menarik kesimpulan terperinci sehingga pertanyaan penelitian terjawab dengan baik.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Identitas Tempat Penelitian

Smp Usdatara Kota Sorong merupakan salah satu satuan pendidikan tingkat Smp yang berlokasi di Kelurahan Sawagumu, yang terletak di Kecamatan Sorong Utara, Provinsi Papua Barat Daya. Dalam pelaksanaan kegiatannya, sekolah ini berada di bawah naungan Yayasan Anak Papua Cerdas. Lokasi penelitian yang beralamat lengkap SMP Usdatara Kota Sorong adalah Jalan Arteri Kilometer 10, Kelurahan Sawagumu, Kecamatan Sorong Utara, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, dengan kode pos 98410. Adapun beberapa keterangan didalam Smp Usdatara Kota Sorong diantaranya alamat, sarana prasarana, jumlah tenaga pendidik laki-laki perempuan, jumlah siswa laki-laki perempuan, dan juga visi misi.

Tabel 4.1.1

Alamat SMP Usdatara Kota Sorong

Identitas	Keteranngan
Nama	SMP Usdatara Kota Sorong
Alamat	Jalan Arteri Permai Kilometer 10
Kelurahan	Sawagumu
Kecamatan	Sorong Utara
Kota/Kabupaten	Kota Sorong
Status	Sekolah Swasta

Tabel 4.1.2

Sarana Prasarana

No	Sarana/Prasarana	Keterangan
1.	Ruang Kelas	Terdapat 3 ruang kelas yang digunakan untuk kegiatan belajar mengajar
2	Ruang Perpustakaan	Terdapat 1 ruang perpustakaan yang dilengkapi berbagai buku dan sumber belajar
3	Ruang Laboratorium	Terdapat 1 ruang laboratorium untuk kegiatan praktikum mata pelajaran IPA
4	Ruang Guru	Terdapat 1 ruang yang digunakan oleh kepala sekolah, guru, dan staf sekolah
5	Lab Komputer	Tersedia 1 ruang laboratorium komputer
6	Kamar Mandi/Toilet	Tersedia 2 unit yang digunakan oleh siswa dan guru
7	Fasilitas Lainnya	Akses internet dan sumber listrik tersedia

Tabel 4.1.3

Jumlah tenaga pendidik

No	Jenis Tenaga	Jumlah
1	Guru Honorer	5 Orang
2	Guru PNS	6 Orang
3	Tenaga Administrasi (TU)	1 Orang

Tabel 4.1.4

Jumlah peserta didik

Kelas	Jumlah Siswa	Laki-laki (L)	Perempuan (P)
VII	10	4	6
VIII	8	3	5
IX	25	17	8

Tabel 4.1.5

Visi Dan Misi SMP USDATARA Kota Sorong

Aspek	Isi
Visi	Unggul dalam Persaingan Belajar dan Beriman
Indikator Visi	1. Menghasilkan peserta didik yang unggul 2. Menghasilkan siswa yang memiliki daya saing dan semangat juang 3. Menghasilkan pribadi yang cerdas 4. Menghasilkan peserta didik yang beriman dan berakhlak mulia
Misi	1. Mendorong semangat belajar peserta didik dalam proses pembelajaran di sekolah 2. Memaksimalkan proses belajar yang aktif, kreatif, dan menyenangkan bagi siswa 3. Mengembangkan afektivitas serta efisiensi penggunaan waktu, sarana, dan tenaga pendidik yang siap mendukung proses belajar 4. Mengembangkan suasana sekolah yang religius dan mendukung pembentukan karakter

Tujuan	1. Mengoptimalkan kehadiran siswa hingga mencapai 100% 2. Menghasilkan tingkat kelulusan siswa yang berkualitas 3. Menghasilkan siswa yang mampu meraih prestasi akademik di jenjang pendidikan selanjutnya 4. Menciptakan suasana sekolah yang mencerminkan akhlak mulia
---------------	--

4.2 Hasil Penelitian

1. Implementasi Nilai-Nilai Demokrasi Dalam Mata Pelajaran PPKn di SMP Usdatara Kota Sorong

Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan adalah proses belajar mengajar di satuan pendidikan yang dilaksanakan secara sistematis untuk meningkatkan dan mengembangkan potensi siswa. Melalui pembelajaran ini, diharapkan siswa dapat membangun karakter sehingga menjadi pribadi yang beretika, cerdas, berbudi pekerti luhur, aktif berpartisipasi, dan bertanggung jawab. Sehingga, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan memiliki peranan penting dalam menumbuhkan nilai-nilai demokrasi di kalangan siswa.

Nilai-nilai demokrasi meliputi toleransi, menghargai perbedaan pendapat, saling menghargai, keterbukaan dalam berkomunikasi, kebersamaan, tanggung jawab, serta disiplin. Nilai-nilai tersebut penting untuk membangun keseimbangan antara hak dan kewajiban serta kebebasan yang dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Berdasarkan nilai-nilai ini, pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dapat mengajarkan etika dan moral individu secara efektif.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Grace Timang Pasulu, S.E. selaku Kepala Sekolah SMP Usdatara Kota Sorong (21 Juli 2025), beliau menyampaikan bahwa sebagai guru

dan pendidik, perannya sangat penting dalam membentuk generasi muda yang memiliki kecerdasan dan berakhlak mulia sehingga mampu beradaptasi dan bermanfaat bagi masyarakat, keluarga, bangsa, dan negara. Sebagai kepala sekolah, beliau selalu mendorong guru-guru lain Agar kegiatan pembelajaran menjadi lebih kreatif sehingga proses belajar dapat berlangsung secara optimal dan efektif, sekaligus menjadi teladan bagi siswa dalam berperilaku baik.

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Kepala Sekolah SMP Usdatara Kota Sorong secara konsisten memberikan arahan dan motivasi kepada guru untuk mencerdaskan siswa sekaligus membentuk kepribadian yang baik. Selain itu, kepala sekolah juga menekankan pentingnya guru PPKn dalam mengimplementasikan nilai-nilai demokrasi, di samping mengembangkan materi, strategi, dan metode pembelajaran yang lebih inovatif, serta menjadi teladan dalam menunjukkan perilaku yang baik.

Keberhasilan implementasi nilai-nilai demokrasi dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di kelas sangat bergantung pada kontribusi guru. Terwujudnya visi dan misi pendidikan ditentukan oleh kemampuan guru dalam menanamkan nilai-nilai demokrasi kepada siswa, guru juga menyediakan kesempatan seluas-luasnya bagi mereka untuk belajar, sekaligus menciptakan suasana kelas yang nyaman, tenang, dan hangat sehingga lingkungan pembelajaran menjadi kondusif dan mendukung siswa belajar secara optimal.

Menurut wawancara dengan siswa Ayu Getina Nahbial kelas IX (Wawancara, 15 juli 2025) Menyatakan bahwa:

“Dalam proses pembelajaran, guru PPKn menerapkan berbagai metode, seperti ceramah, tanya jawab, diskusi, penugasan individu maupun kelompok, serta presentasi. Guru biasanya memulai dengan menjelaskan materi terlebih dahulu, kemudian melakukan sesi tanya jawab untuk memastikan siswa memahami materi yang diberikan. Setelah itu, guru memberikan tugas yang dapat dikerjakan secara mandiri maupun dalam kelompok”.

Dari pernyataan itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa guru PPKn dalam kegiatan pembelajaran biasanya menerapkan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, presentasi, serta penugasan. Penerapan metode-metode ini mencerminkan implementasi nyata nilai-nilai demokrasi dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Dalam metode ceramah, guru menyampaikan materi secara langsung kepada siswa, yang mencerminkan nilai demokrasi berupa persamaan hak karena semua siswa memperoleh akses informasi yang sama. Dalam metode diskusi, siswa bertukar pendapat atau memecahkan masalah bersama, yang mencerminkan nilai demokrasi dengan melatih kebebasan berpendapat, mengajarkan toleransi, serta menguatkan sikap musyawarah untuk mufakat. Pada metode tanya jawab, terjadi interaksi langsung antara guru dan siswa atau antar siswa, yang melatih keberanian siswa dalam menyampaikan pendapat serta memberi kesempatan yang setara bagi semua siswa untuk berbagi ide. Sementara dalam metode penugasan, implementasi nilai demokrasi tercermin dalam menanamkan rasa tanggung jawab pada siswa dengan cara menyelesaikan tugas yang diberikan, mendorong kedisiplinan, dan menumbuhkan kesadaran akan hak serta kewajiban.

Sedangkan menurut wawancara dengan siswa Verlita Sahertian kelas VIII (Wawancara, 16 juli 2025) menyatakan bahwa:

“Menurut pandangan saya, guru PPKn dalam proses pembelajaran telah melaksanakan serta menjalankan nilai-nilai demokrasi. Hal ini tercermin dari sikap terbuka guru dan memfasilitasi siswa agar dapat menyampaikan pertanyaan terkait materi yang belum jelas bagi mereka atau di mengerti oleh siswa serta kami juga diberikan kesempatan oleh guru untuk mendiskusikan atau menyelesaikan Tugas yang di berikan”.

Kemudian wawancara dengan siswa Yusuf Yotam Way kelas VII (Wawancara , 16 juli 2025) menyatakan bahwa :

“Dalam kegiatan pembelajaran, guru PPKn dianggap telah menerapkan nilai-nilai demokrasi karena memperlakukan seluruh siswa secara adil tanpa membedakan. Selain itu, guru selalu menekankan pentingnya bertanya ketika ada materi yang belum dipahami, serta membiasakan siswa agar berani berpartisipasi dengan mengangkat tangan sebelum menyampaikan pertanyaan atau pendapat.”

Berdasarkan pernyataan di atas bahwa di setiap pembelajaran guru PPKn tidak selalu menggunakan metode ceramah dalam menyampaikan materi, tetapi juga melibatkan siswa secara aktif melalui diskusi, tanya jawab, dan kegiatan belajar yang menumbuhkan partisipasi serta tanggung jawab memberikan kesempatan yang luas kepada siswa-siswi untuk berpendapat. Hal ini sesuai dengan modul ajar yang telah dibuatkan oleh guru yang dimana pada kegiatan inti pembelajaran terdapat pembelajaran berupa diskusi, tanya jawab, presentasi, dan penugasan kelompok maupun

individual pelaksanaan pembelajaran tersebut telah mengandung nilai-nilai demokrasi yaitu saling menghargai, nilai kebebasan, baik itu kebebasan berpendapat, tanggung jawab, Toleransi, kebersamaan, disiplin, saling menghargai perbedaan pendapat dan keterbukaan dalam berkomunikasi. Proses pembelajaran yang diterapkan oleh guru sudah berupaya menanamkan dan membiasakan siswa dapat mengamalkan nilai dasar demokrasi dalam proses pembelajaran. Hal tersebut menyatakan bahwa dalam proses belajar mengajar tidak terdapat tindakan memaksa atau bersifat otoriter.

Berdasarkan hasil penelitian, nilai-nilai demokrasi yang ditanamkan kepada siswa melalui pembelajaran PPKn di SMP Usdatara Kota Sorong yaitu Nilai Toleransi dan Nilai Kebebasan., Kebebasan dalam berpendapat, Kebebasan berkelompok, Kebebasan berpartisipasi.

a. Toleransi

Toleransi adalah sikap untuk menerima dan menghargai perbedaan orang lain serta hidup berdampingan. Tidak ada dua orang yang sama; semua orang memiliki latar belakang, perspektif, kebiasaan, dan keyakinan yang berbeda. Mengakui bahwa "Oke, kamu berbeda denganku, dan itu tidak apa-apa. saya menghargai dan menghormati perbedaanmu itu" sama dengan memiliki toleransi. Yang bersekolah di sekolah ini ada siswa dari berbagai agama salah satunya ada agama Kristen dan Islam yang dimana saat salah satu siswa merayakan hari raya agamanya (misalnya Idul Fitri, Natal). Siswa yang beragama berbeda mengucapkan selamat hari raya, menghormati teman yang sedang menjalankan ibadah dengan tidak mengganggu, dan bahkan mungkin membantu dalam persiapan kegiatan sekolah yang berkaitan

dengan hari raya, seperti membantu mendekorasi kelas atau membuat makanan untuk buka puasa bersama. Agar semua siswa memahami dan menghargai hari raya, guru juga dapat mendorong diskusi tentang artinya hari raya. Guru itu sendiri harus menjadi contoh harus menunjukkan sikap terbuka, adil, dan tidak memihak kepada siswa dari latar belakang yang berbeda-beda. Selama pembelajaran guru PPKn selalu menekankan tentang toleransi Serta menghormati perbedaan agama dan kepercayaan di antara teman-teman yang lain.

Menurut wawancara dengan siswa Melati kelas VII (wawancara 16 juli 2025) menyatakan bahwa:

“saat di dalam kelas sebelum memulai pembelajaran saya dan teman-teman beserta guru mata pelajaran mengawalinya dengan doa, dan pada saat kami melaksanakan doa sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan masing-masing serta kami tidak saling mengganggu saat teman sedang berdoa.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukan bahwa siswa-siswa yang ada di sekolah ini saling menghormati dalam perbedaan atau bertoleransi

b. Kebebasan Berpendapat

Karena setiap siswa didorong untuk bertanya maupun mengemukakan pendapat selama kegiatan pembelajaran serta nilai kebebasan merupakan komponen penting dari proses pembelajaran. Satu dari nilai-nilai demokrasi adalah kebebasan berbicara. Dan siswa harus dilatih untuk memiliki keberanian untuk menyuarakan pendapat mereka Sejak awal,

agar peserta didik belajar metode yang benar dalam mencapai kesepakatan dalam organisasi. Selain itu, keberanian untuk menyuarakan pendapat juga harus diberikan apresiasi. Dengan kata lain, jika ada pendapat yang tidak sesuai, tanggung jawab guru adalah meluruskannya, bukan langsung menyalahkannya. untuk meningkatkan kepercayaan diri siswa.

Selama pembelajaran berlangsung, guru PPKn dapat secara leluasa memberikan pertanyaan ketika ada siswa yang belum mengerti materi yang diberikan dengan diskusi kelas yang dilakukan secara terbuka, walaupun diskusi tersebut kerap menimbulkan perbedaan pendapat antar siswa. Guru PPKn bertugas menengahi dan menetralisasi konflik ini. Peserta didik akan lebih berani dan terbuka jika mereka memiliki kebebasan untuk bertanya dan menyuarakan pendapat mereka.

c. Kebebasan Berkelompok

Setiap orang memiliki kebebasan untuk berkelompok agar membentuk, bergabung, dan berpartisipasi dalam suatu organisasi atau kelompok secara sukarela tanpa dipaksakan, di diskriminasi karena alasan apa pun. Kebebasan ini merupakan hak asasi manusia dan prinsip dasar demokrasi, yang menjamin bahwa setiap orang dapat menyuarakan pendapat, memperjuangkan kepentingan bersama, dan bekerja sama dalam berbagai kegiatan sosial, politik, budaya, atau pendidikan.

Kegiatan ekstrakurikuler seperti osis dan pramuka dapat memberikan kebebasan berkelompok di sekolah.

d. Kebebasan Berpartisipasi

Kebebasan berpartisipasi adalah hak setiap orang untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan, proses pengambilan keputusan, atau pelaksanaan program yang berkaitan dengan kehidupan bersama, baik di sekolah, masyarakat, atau negara. Kebebasan berpartisipasi dalam demokrasi berarti bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat, memberikan masukan, memilih, dan berkontribusi pada kegiatan kolektif tanpa tekanan, diskriminasi, atau pembatasan yang tidak adil.

Siswa di SMP Usdatara Kota Sorong memiliki kesempatan untuk berpartisipasi secara bebas Selama proses pembelajaran, baik di ruang kelas maupun di luar kelas. Misalnya, siswa dapat berpartisipasi dalam diskusi kelompok jika mereka menghadapi kesulitan menjawab pertanyaan yang diberikan kelompok lain, sementara siswa lain dapat berpartisipasi membantu dalam memberikan jawaban pertanyaan tersebut. Di luar kelas, siswa juga diizinkan untuk melakukan pemilihan ketua osis.

Menurut wawancara dengan siswa Selly Febbriana Makmur Kelas XI (Wawancara, 15 juli 2025) Menjelaskan bahwa:

“Ya, baik dalam pemilihan ketua OSIS maupun dalam kegiatan lain, misalnya kompetisi antar sekolah, seluruh peserta didik di libatkan, namun di seleksi dan siapa- siapa yang ingin berpartisipasi “.

Selain itu ada juga, Menurut wawancara dengan siswa Seli Kornelia pomsaro kelas VIII (Wawancara 16 juli 2025) menyatakan bahwa:

“Ya, Kami seluruh peserta didik dilibatkan dalam kegiatan sekolah, baik di dalam area sekolah maupun di luar lingkungan sekolah, Misalnya

Setiap hari senin kami melakukan upacara bendera yang diimana kami sudah di bagikan piket setiap hari senin yang menjadi petugas upacara adalah kelas VII minggu pertama , nanti minggu kedua dan seterusnya kelas VIII dan IX dan seterusnya bergantian“

Dengan demikian, seluruh siswa berkesempatan bebas untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan sekolah, termasuk pemilihan ketua OSIS, menjadi petugas upacara setiap hari senin, Baik dalam kompetisi yang diadakan di sekolah maupun di luar sekolah.

Sementara itu, penerapan nilai-nilai demokrasi di SMP Usdatara Kota Sorong

Masing-masing sila dalam Pancasila yaitu:

- a. Sila Pertama: Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa diterapkan dengan menekankan bahwa siswa dari berbagai latar agama maupun keyakinan tidak boleh saling merendahkan. Mereka didorong untuk saling menghormati serta melaksanakan ibadah sesuai agamanya masing-masing. Di awal pembelajaran, siswa dipersilakan untuk berdoa menurut agama mereka tanpa adanya diskriminasi. Contohnya, pada saat pelajaran agama Kristen, siswa yang beragama Kristen melakukan doa sesuai tata ibadah agamanya, Siswa yang memiliki agama berbeda diberikan kebebasan untuk memilih apakah ingin mengikuti pembelajaran atau tidak. Namun, apabila memilih untuk tidak ikut serta, mereka tidak diperbolehkan berkeliaran. Sebaliknya, jika mereka tidak mau belajar, mereka akan diberikan tugas dan mengerjakannya di perpustakaan.

Penghormatan terhadap kebebasan beragama dan toleransi antar umat beragama mencerminkan demokrasi di sini. Setiap siswa memiliki

kesempatan yang setara untuk turut serta dalam kegiatan keagamaan dengan bebas.

- b. Sila Kedua : Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradap yaitu siswa menghormati teman tanpa membedakan latar belakang atau Siswa tidak diskriminasi teman berdasarkan agama, suku, ras, atau status ekonomi, dan siswa saling membantu teman yang dalam kesusahan misalnya saat ada teman yang sedang dalam kesakitan atau pun jika ada siswa yang tertimpa musibah, siswa lainnya selalu berinisiatif mengumpulkan dana melalui sumbangan sukarela yang kemudian diserahkan kepada siswa yang sakit maupun terkena musibah siswa bersikap sopan dan santun kepada guru, teman, dan staf sekolah yang dimana menghormati pendapat orang lain, mengucapkan salam, dan berbicara dengan tata bahasa yang baik dan benar.
- c. Sila Ketiga: Persatuan Indonesia diwujudkan melalui sikap siswa yang selalu rukun dan bersatu serta berkerja sama meskipun berbeda suku, dan juga siswa tidak hanya menggandeng kerja sama dalam memecahkan soal atau permasalahan yang diberikan guru selama pembelajaran di kelas, tetapi juga menunjukkan kekompakan dan kerjasama saat mengikuti berbagai perlombaan atau kerja bakti bersama membersihkan lingkungan sekolah atau ruang kelas. Guru mengaitkan pelajaran dengan nilai-nilai persatuan bangsa melalui sejarah perjuangan kemerdekaan, PPKn, atau kegiatan proyek berbasis profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, para siswa melakukan upacara bendera untuk menunjukkan cinta tanah air, kedisiplinan, dan nasionalisme sebagai bagian dari semangat persatuan bangsa.

- d. Sila Keempat: Kerakyatan yang Berlandaskan Hikmat Kebijaksanaan dalam Proses Musyawarah serta Perwakilan diterapkan ketika siswa menghadapi suatu permasalahan. Penyelesaian dilakukan melalui musyawarah, termasuk jika ada siswa yang mengalami kesulitan dengan nilai mereka, guru meminta pendapat siswa lain untuk mencari solusi bersama. Setiap siswa memiliki hak untuk menyuarakan pendapat mereka dengan cara yang sopan dan terbuka. Adanya OSIS berfungsi sebagai tempat bagi siswa untuk menyampaikan keinginan mereka dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan.
- e. Sila Kelima: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia' diterapkan dalam pembelajaran di kelas, di mana guru tidak membedakan siswa, baik yang berprestasi maupun yang kurang, dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua untuk menyampaikan pendapat misalnya saat pembagian tugas. Guru tidak membebani satu siswa saja, tetapi membagi tugas kelompok dengan adil. Siswa yang lebih pintar tidak merendahkan temannya yang kesulitan belajar; sebaliknya, mereka membantu mereka. Setiap siswa mendapatkan buku, meja, dan alat praktik yang sama. Untuk siswa yang berasal dari keluarga yang kurang mampu, sekolah memberikan bantuan atau beasiswa. Serta menjaga ketertiban dan keadilan tidak melanggar aturan sekolah karena aturan dibuat untuk kepentingan bersama.

2. Faktor Pendukung Implementasi Nilai-nilai demokrasi dalam pembelajaran PPKn di SMP Usdatara Kota Sorong

Untuk Pencapaian dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) sebagai media untuk menanamkan nilai-nilai demokrasi pada

siswa di SMP Usdatara Kota Sorong, dibutuhkan faktor-faktor pendukung yang memadai. Salah satu faktor tersebut adalah sarana dan prasarana. Sarana didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat atau perlengkapan guna meningkatkan kelancaran dan efektivitas kegiatan pembelajaran. Prasarana adalah fasilitas dasar yang secara tidak langsung mendukung pelaksanaan suatu kegiatan. Bukan hanya sarana Dan prasarana tapi juga ada dorongan dari para guru, kemudian kurikulum dalam proses pembelajaran

Menurut wawancara dengan Ibu Grace Timang Pasulus, SE. (Wawancara, 21 Juli 2025) selaku kepala sekolah SMP Usdatara Kota Sorong menjelaskan bahwa:

“Pencapaian dalam dunia pendidikan dan proses pembelajaran erat kaitannya dengan keberadaan sarana serta prasarana, dan juga berupa dukungan dari guru-guru terkhususnya guru mata pelajaran PPKn dan kemudian salah satu pendukungnya juga yaitu Kurikulum dalam proses pembelajaran”

Keterangan ini semakin diperkuat melalui wawancara dengan Bapak, Dr. Justinus Way (Wawancara, 22 juli 2025) selaku guru bidang studi Pendidikan Pancasila dan kewaragenegaraan

“Pada proses pembelajaran, saya rutin menggunakan berbagai media pembelajaran, misalnya Buku paket pelajaran PPKn, gambar toko nasional, bagan struktur pemerintahan, LKS, Laptop, Serta sejumlah buku referensi sebagai pendukung dalam kegiatan pembelajaran”

Berdasarkan hasil wawancara, ketersediaan sarana dan prasarana memberi peluang bagi guru untuk lebih kreatif dalam menggunakan media pembelajaran, sehingga proses

belajar menjadi lebih efektif dan efisien, serta didukung oleh proses pembelajaran yang menjadi faktor utama dalam menunjang keberhasilan proses pembelajaran. Oleh karena itu, guru tidak monoton dalam menyampaikan mata pelajaran dan siswa tidak merasa bosan selama proses pembelajaran.

Selain sarana dan prasarana, kegiatan yang diselenggarakan di sekolah, seperti OSIS, juga menjadi faktor pendukung dalam menanamkan nilai-nilai demokrasi pada siswa. Faktor tambahan yang berperan penting dalam proses implementasi nilai-nilai demokrasi adalah keteladanan yang ditunjukkan oleh guru dalam keseharian mereka.

Wawancara dengan Bapak, Dr Justinus way (Wawancara, 22 juli 2025) selaku guru mata pelajaran PPKn menyatakan bahwa:

“Didalam proses pembelajaran untuk Saya berusaha menanamkan nilai-nilai demokrasi kepada siswa dengan memberikan teladan secara langsung melalui sikap dan tindakan yang mencerminkan contoh nyata praktik Pemerintahan oleh rakyat.”.

Dari hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa implementasi nilai-nilai demokrasi pada siswa di SMP Usdatara Kota Sorong, bukan hanya sarana dan prasarana yang menjadi pendukung, tetapi kurikulum dan keteladanan dari seorang guru yang menjadi contoh untuk para siswanya untuk memperlihatkan secara langsung implementasi nilai-nilai demokrasi agar siswa lebih mudah untuk memahaminya. Selain itu, guru menggunakan pendekatan vaktual, yang merupakan pendekatan khusus dalam pembelajaran. Pendekatan ini senantiasa menghubungkan materi dengan keadaan yang nyata.

3. Faktor Penghambat Implementasi Nilai-nilai demokrasi dalam pembelajaran PPKn di SMP Usdatara Kota Sorong

Untuk mencapai keberhasilan dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan yang dimana Sebagai sarana penanaman nilai-nilai demokrasi pada siswa-siswi di SMP Usdatara Kota Sorong, tentu terdapat kendala yang dihadapi guru dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, yakni perbedaan individual. Setiap siswa memiliki karakter, sifat, maupun perilaku yang berbeda-beda, baik secara fisik maupun psikis. Perbedaan ini menuntut adanya perlakuan yang berbeda antara satu siswa dengan siswa lainnya. Oleh sebbab itu sebagai seorang guru dituntut mampu merancang strategi pembelajaran, khususnya dalam memilih metode yang sesuai dengan kemampuan siswa dalam pembelajaran.

Menurut wawancara dengan Bapak, Dr. Justinus way (Wawancara , 22 juli 2025) Selaku guru mata pelajaran PPKn menyatakan bahwa :

“Faktor penghambat dalam pelaksanaan nilai-nilai demokrasi pada proses pembelajaran PPKn adalah adanya perbedaan individu. Beberapa siswa menunjukkan kepekaan yang tinggi, sebagian lainnya lebih lamban, ada yang mudah diatur, tetapi ada juga yang sulit untuk diarahkan di atur.”

Selain itu Wawancara dengan Ibu Grace Timang Paulus,SE. (Wawancara, 21 juli 2025) selaku kepala sekolah menyatakan bahwa:

“faktor penghambat nilai-nilai demokrasi yaitu kurangnya ada kesadaran terhadap pemahaman nilai-nilai demokrasi “.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dinyatakan bahwa faktor penghambatnya yaitu bahwa adanya Adanya perbedaan karakteristik individu siswa berpengaruh besar pada proses belajar dan tidak bisa dihindari. Akan tetapi, guru harus menyiasatinya dengan memilih pendekatan pembelajaran yang lebih kreatif agar tujuan pembelajaran dapat dicapai.

4.3 Pembahasan

Pendidikan adalah suatu sarana atau tempat yang dimana semua orang dapat digunakan untuk mencari atau menimba ilmu pengetahuan (*transfer of knowledge*). Pendidikan sangat penting yang dimana sangat di harapkan dapat membangun dan mengembangkan potensi yang ada dalam diri manusia agar memiliki karakter, integritas, pendidikan yang bermakna dalam kehidupan seharusnya mengarahkan peserta didik Pendidikan dipahami dan dijalankan sebagai upaya menciptakan ruang belajar yang kondusif, sekaligus menumbuhkan nilai kemanusiaan, keluhuran budi, kejujuran, serta sikap beradab. sebagai landasan moral dan sosial. Pendidikan sangat penting untuk menanamkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip oleh sebab itu Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan (PPKn) yang lebih tepatnya memiliki peran penting dalam menanamkan atau membentuk karakter seseorang agar memiliki karakter atau sikap yang selaras dengan ajaran yang terkandung dalam Pancasila. Menurut Sunarso, ddk; 2008; 1 (Dalam Machful indra Kurniawan, M.Pd. 2018) Mengemukakan bahwa pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang berperan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia melalui pendekatan pendidikan berbasis nilai. Selain itu, PPKn bertujuan untuk membekali peserta didik dengan

kemampuan berpikir kritis sehingga mereka mampu menganalisis dan menilai berbagai persoalan secara rasional, berpartisipasi, berkembang secara positif (Hlm 26-27).

Dari hasil penelitian yang diperoleh, terlihat bahwa siswa telah memperoleh penanaman nilai-nilai demokrasi yang tercermin dalam sikap, perilaku, serta keterlibatan mereka dalam kegiatan sekolah SMP Usdatara diantaranya yaitu nilai kebebasan berpendapat, berkelompok, berpartisipasi

Kebebasan berpendapat, berpartisipasi, dan nilai tersebut menjadi bagian yang terkandung dalam praktik berdemokrasi. Dalam kegiatan pembelajaran, guru berperan menegaskan kepada siswa bahwa adanya perbedaan pendapat adalah hal biasa, namun tetap harus diungkapkan dengan tata krama supaya tidak menyinggung orang lain.

Adapun materi lain yang diberikan melalui kegiatan pembelajaran Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan adalah, toleransi, menghargai perbedaan pendapat, terbuka dalam berkomunikasi, saling menghargai, kebersamaan, tanggung jawab, disiplin. Kemudian Metode pembelajaran yang diterapkan guru diarahkan agar siswa dapat bekerja sama secara efektif dalam kelompok. Di samping itu, guru memberikan keleluasaan kepada siswa untuk menentukan atau membentuk kelompoknya sendiri, meskipun pada kondisi tertentu guru juga mengambil peran langsung dalam membagi siswa ke dalam kelompok diskusi.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan memiliki fungsi mengembangkan kemampuan, membentuk kepribadian, dan menciptakan peradaban bangsa yang bermanfaat guna mencerdaskan kehidupan berbangsa. Pendidikan ditujukan untuk mengoptimalkan potensi peserta didik agar tumbuh sebagai manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan

Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berpengetahuan, terampil, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab (Pasal 3 UU RI No. 20 Tahun 2003). Dengan menyatakan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan berperan sebagai wadah bagi siswa untuk mengembangkan potensi serta kemampuan yang dimiliki sehingga mereka dapat tumbuh menjadi pribadi yang berakarakter. Dengan demikian, pembelajaran PPKn dapat diposisikan sebagai sarana utama dalam proses pembentukan kepribadian peserta didik.

Pengamalan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan sekolah penting dilakukan sebagai bekal dalam menghadapi era globalisasi, yang diprediksi akan membawa perubahan besar melalui masuknya berbagai budaya dan peradaban bangsa lain. Kondisi ini menuntut dunia pendidikan untuk menyiapkan Sumber daya manusia yang berkualitas dan profesional akan membentuk generasi berkepribadian kuat serta memiliki sikap demokratis dalam menyikapi dinamika dan potensi konflik peradaban

Sekolah berfungsi sebagai unit sosial yang dibentuk secara terencana oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan yang disepakati bersama. Tujuan pokoknya adalah mendidik anak-anak serta mengarahkan mereka menjadi individu dewasa yang mampu mandiri dalam aspek psikologis, biologis, maupun sosial. Dalam kerangka ini, pendidikan demokrasi menekankan pentingnya pengembangan kecerdasan intelektual, pembentukan kepribadian, serta kemampuan sosial dan sekolah bertanggung jawab untuk mengintegrasikan pembelajaran akademik dengan pengalaman nyata di masyarakat.

Mewujudkan pembentukan pribadi yang demokratis merupakan salah satu fungsi pendidikan nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU Nomor 20 Tahun

2003 tentang Sisdiknas. Di lingkungan sekolah, penanaman nilai-nilai demokrasi tidak hanya ditujukan pada pembentukan karakter peserta didik, tetapi juga diwujudkan melalui proses pembelajaran yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas serta efektivitas hasil belajar siswa.

Kelas menjadi wadah penting di mana guru dan peserta didik belajar dan membiasakan diri menegakkan nilai-nilai demokrasi. Dalam konteks ini, prinsip-prinsip seperti toleransi, kebebasan mengemukakan pendapat, dan penghargaan terhadap perbedaan menjadi bagian integral dari proses pembelajaran, saling menghargai, kebersamaan, disiplin, tanggung jawab, serta kesetaraan hak dan kewajiban diwujudkan, misalnya melalui pembagian tanggung jawab menjaga kebersihan kelas, kenyamanan lingkungan belajar, serta kelancaran kegiatan belajar mengajar yang aman dan kondusif merupakan elemen penting dalam proses pembelajaran. Semangat persaudaraan antara guru dan siswa seharusnya menjadi bagian dari iklim belajar di setiap mata pelajaran. Interaksi antara guru dan siswa bersifat setara, di mana keduanya berperan sebagai subjek yang sama-sama aktif dalam membangun karakter, jati diri, dan kualitas pendidikan peserta didik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Keberadaan sarana dan prasarana memberikan kontribusi penting sebagai pendukung keberhasilan. Guru menggunakan media pembelajaran secara bervariasi, sehingga proses belajar mengajar lebih efektif dan efisien. Di SMP Usdatara, sarana dan prasarana seperti laptop, LCD, buku paket PPKn, dan buku referensi pendukung membantu kelancaran pembelajaran, membuat siswa tetap fokus dan tidak merasa jenuh karena penyampaian materi tidak monoton.

Salah satu faktor yang menghambat pelaksanaan perbedaan karakter dan individualitas siswa merupakan bagian dari implementasi nilai-nilai demokrasi di lingkungan sekolah. Setiap siswa memiliki kemampuan dan tingkat kepekaan yang berbeda, sehingga beberapa siswa lebih cepat dalam menangkap materi, sedangkan yang lain membutuhkan waktu lebih lama. Selain itu, terdapat perbedaan dalam sikap, di mana sebagian siswa mudah diatur, tetapi sebagian lainnya lebih sulit diatur. Kondisi ini menuntut guru untuk berinisiatif menerapkan pendekatan pembelajaran yang efektif agar tujuan pendidikan tercapai dengan hasil yang optimal.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan bahwa pembelajaran PPKn di SMP Usdatara Kota Sorong berhasil menanamkan nilai-nilai demokrasi, terutama toleransi dan kebebasan, yang mencakup kebebasan berpendapat, berkelompok, dan berpartisipasi. Guru menggunakan berbagai metode pengajaran, seperti ceramah, dialog, diskusi kelompok, dan pemberian tugas, memberikan kesempatan bagi siswa memiliki ruang yang luas untuk mengemukakan gagasan dan pendapat. Penanaman sikap demokratis sejak dini ini membuat siswa mampu menerapkan landasan moral demokrasi Pada aktivitas sehari-hari, baik di lingkungan sekolah maupun dalam masyarakat.

Faktor pendukung implementasi nilai-nilai demokrasi di SMP Usdatara mencakup:

1. Media pendukung proses belajar mencakup LCD, laptop, lembar kerja siswa, serta buku referensi, yang mendukung keberhasilan pembelajaran.
2. Kegiatan Ekstrakurikuler, khususnya OSIS, yang menyediakan ruang bagi siswa untuk menentukan aktivitas yang sesuai dengan minat mereka. sekaligus memperkuat kerja sama antar siswa.
3. Keteladanan Guru, di mana guru menjadi contoh langsung dalam menerapkan nilai-nilai demokrasi sehingga siswa meneladani perilaku tersebut.

Adapun faktor penghambat utama adalah perbedaan individual antar siswa. Setiap siswa menunjukkan tingkat kemampuan yang beragam, yang mempengaruhi kelancaran proses pembelajaran dan penerapan nilai-nilai demokrasi.

5.2 Saran

a. Bagi Guru dan Sekolah

Guru PPKn diharapkan berperan dalam menstimulasi siswa yang cenderung pasif agar lebih terlibat aktif dalam diskusi maupun kerja kelompok, sehingga tumbuh keberanian untuk menyampaikan pendapat serta tampil di depan kelas. Sekolah pun dituntut untuk senantiasa memperkuat penanaman nilai-nilai demokrasi melalui program pendidikan yang berkelanjutan.

b. Bagi Siswa

Sebagai bagian dari generasi penerus, siswa diharapkan tidak hanya memahami konsep demokrasi, tetapi juga menginternalisasikan serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mereka hendaknya aktif dalam pembelajaran, baik melalui penyampaian gagasan maupun penghargaan terhadap pendapat orang lain, serta membiasakan diri dengan sikap toleransi, saling menghargai, dan bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Khansa, B. B., & Dewi, D. A. (2021). Pendidikan Kewarganegaraan: Membangun Masyarakat Demokrasi Yang Berkeadaban Dari Saat Ini. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(1), 249-258.
- Azzahra, A., & Sumardjoko, B. (2023). Analisis Penerapan Nilai-Nilai Demokrasi Dalam Kegiatan Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) di SMA Negeri Gondangrejo. *Jurnal Penelitian, Pendidikan dan Pengajaran: JPPP*, 4(2), 91-96.
- anugrahdwi.2023."Demokrasi: Pengertian, Sejarah dan Contohnya".<https://pascasarjana.umsu.ac.id/demokrasi-pengertian-sejarah-dan-contohnya/>. 3 Maret 2025
- Azizah, S. N., & Prasetyo, W. H. (2023). Profil Pelajar Pancasila dalam Kurikulum Merdeka: Persepsi dan Harapan Pengajar PPKn. *JlIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(7), 5375-5383.
- Abdillah, M. A. (2019). Demokrasi dalam Pandangan Yusuf Al-Qaradhawi. *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam*, 6(2), 1-18.
- Azani, A., Sarmila, S., & Gusmaneli, G. (2024). Hakikat Belajar dan Pembelajaran. *Mutiara: Jurnal Penelitian Dan Karya Ilmiah*, 2(3), 17-37.
- Abdillah, M. A. (2019). Demokrasi dalam Pandangan Yusuf Al-Qaradhawi. *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam*, 6(2), 1-18.
- Azani, A., Sarmila, S., & Gusmaneli, G. (2024). Hakikat Belajar dan Pembelajaran. *Mutiara: Jurnal Penelitian Dan Karya Ilmiah*, 2(3), 17-37.
- Berti Damayanti. 2016. Implementasi Pendidikan demokrasi dalam mata Pelajaran IPS di SMP Diponegoro Majenang Cilacap .
- Bahroni, M. (2018). Analisis Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak Dalam Kitab Taisirul Khallaq Karya Syaikh Khafidh Hasan Al-Mas' udi. *Intelektual: Jurnal Pendidikan dan Studi Keislaman*, 8(3), 345-356.
- Dianingrum, Y. (2021). Pemahaman siswa SD terhadap materi pembelajaran Bahasa Jawa ditinjau dari minat baca (Doctoral dissertation, STKIP PGRI PACITAN).
- Elwijaya, F., Neviyarni, N., & Irdamurni, I. (2021). Sistem, Nilai, dan Norma dalam Pendidikan Dasar: Sebuah Kajian Literatur. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(1), 1840-1845.

- Embong, M. (2021). Upaya Meningkatkan Kedisiplinan Siswa Kelas Viii Pada Smp Negeri 1 Suppa Melalui Layanan Bimbingan Sosial. *Jurnal Kependidikan Media*, 10(2), 103-117.
- Ephivani Kuartis Nabus, Chontina Siahaan. 2021 " Demokrasi Sebagai Bentuk Komunikasi PolitikKaum Remaja “
- Kurniawan, M. I. (2018). Buku Ajar Konsep Dasar Pendidikan Kewarganegaraan Sekolah Dasar. Umsida Press, 1-115.
- Lutpiani, E. (2021). Implementasi Demokrasi di Indonesia.
- Mazid, S., & Suharno, S. (2019). Implementasi nilai-nilai multikultural dalam pembelajaran PKn. *Harmoni Sosial: Jurnal Pendidikan IPS*, 6(1), 72-85.
- Marisa, M. (2021). Inovasi kurikulum “Merdeka Belajar” di era society 5.0. *Santhet (Jurnal Sejarah Pendidikan Dan Humaniora)*, 5(1), 66-78.
- Nungki Dwi Abshita Rini 2017.Implementasi Nilai-Nilai Demokrasi Melalui Pembelajaran Pendidikan Kewaragnegaraan.
- (Rawanoko & Wuryandani, 2018) - Menjelaskan penerapan karakter demokratis dalam pembelajaran PPKn melalui metode diskusi dan evaluasi.
- Rini Yuliana.2013, Implementasi Nilai-Nilai Demokrasi dalam Pembelajaran Pendidikan Kewaranegraan di SMP Negeri 3 Grising Batang.Skripsi. Jurusan Politik dan Kewaranegaraan.Fakultas Ilmu sosial.Universitas Negeri Semarang.
- Raharjo, R. (2020). Analisis perkembangan kurikulum PPKn: dari Rentjana pelajaran 1947 sampai dengan merdeka belajar 2020. *PKn Progresif: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Kewarganegaraan*, 15(1), 63-82.
- Setyaningsih, S., & Wiryanto, W. (2022). Peran guru sebagai aplikator profil pelajar pancasila dalam kurikulum merdeka belajar. *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 8(4), 3041-3052.
- Suwarsa, T. (2021).Pengaruh Pajak Restoran Dan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padangsidempuan Periode 2018-2020. *Jurnal Akuntansi*, 51(1), 1–
- Simbolon, D. S., Sari, J., Purba, Y. Y., Siregar, N. I., Salsabila, R., & Manulang, Y. (2021). Peranan Pemerintah Desa dalam Pembangunan Infrastruktur. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(2), 295-302.
- Udu, S. (2024). NILAI MORAL DALAM NOVEL KISAH YANG PILU UNTUK KITA YANG RAGU KARYA BOY CANDRA. *Jurnal Pesastra (Pendidikan Bahasa dan Sastra)*, 1(2), 53-62.

L

A

M

P

I

R

A

N

Lampiran 1

INSTRUMEN PENELITIAN

Lembar Instrumen Wawancara Kepala Sekolah

Nama : Grace Timang Pasulu,SE.

Jabatan: 2 Tahun

1. Bagaimana kebijakan sekolah dalam mendukung penerapan nilai-nilai demokrasi dalam pembelajaran?

Jawaban :

Sebagai seorang guru atau pendidik, saya memiliki peran penting dalam membentuk generasi muda yang cerdas dan berahlak mulia sehingga dapat berguna bagi masyarakat, keluarga, bangsa, dan negara. Sebagai kepala sekolah, saya selalu memotivasi guru-guru lain untuk menjadi lebih kreatif dalam kegiatan pembelajaran agar proses belajar dapat berjalan dengan baik dan memberi contoh dan teladan yang baik untuk berperilaku baik. kepada siswa”

2. Apa program atau kegiatan yang dilakukan sekolah untuk menanamkan nilai-nilai demokrasi kepada siswa?

Jawaban :

Ya, dengan upacara bendera setiap hari senin , bukan hanya itu saja tetapi dengan mengperingkat hari-hari besar seperti Hari Kemerdekaan atau Hari lahir Pancasila

3. Bagaimana peran guru dalam mengimplementasikan nilai-nilai demokrasi di sekolah?

Jawaban :

Sebagai seorang kepala sekolah tentunya saya menjadi teladan atau menjadi contoh buat siswa -siswi

4. Apa tantangan terbesar dalam membangun budaya demokrasi di lingkungan sekolah?

Jawaban :

Kurangnya pemahaman siswa terkait demokrasi dan karakter siswa

5. Menurut bapak/ Ibu Apa saja faktor pendukung Impelemntasi nilai-nilai demokrasi dalam pembelajaran PPkn di SMP Usdatara Kota Sorong ?

Jawabaaan :

Keberhasilan sebuah pendidikan dan pembelajaran tidak terlepas dari keberadaan sarana dan prasarana, dan juga dukungan dari guru PPKn dan juga kurikulum dalam proses pembelajaran

6. Menurut bapak/ Ibu Apa saja faktor penghambat Impelemntasi nilai-nilai demokrasi dalam pembelajaran PPkn di SMP Usdatara Kota Sorong ?

Jawabaaan :

Ya, kurangnya ada kesadaran terhadap pemahaman nilia-nilai demokrasi

7. Menurut bapak / ibu siapa yang paling berperan dalam mengimplementasikan nilai-nilai demokrasi dalam pembelajaran PPKn di sekolah ini ?

Jawabaaan :

Guru PPkn, seluruh guru dan tenaga pendidik , kepala sekolah

8. Apakah disekolah ini di terapkan Pendidikan demokrasi ? jika iya , apakah sudah berjalan dengan baik ?

Jawabaaan :

Ya , sudah berjalan dengan efektif dan efesien

9. Kegiatan Demokrasi seperti apakah yang sering dilakukan di sekolah ini dan apakah seluruh siswa di libatkan dalam kegiatan tersebut?

Jawabaaan :

Ya dengan melakukan upacara serta melakukan ceramah tentang kesatuan bangsa

10. Sebagai kepala sekolah bagaimana peran dan Upaya anda dalam proses penanaman nilai-nilai demokrasi pada siswa ?

Jawabaaan :

Sebagai kepala sekolah, saya memiliki tanggung jawab untuk menanamkan prinsip-prinsip demokrasi pada siswa

INSTRUMEN PENELITIAN

Lembar Instrumen Wawancara Guru PPKn

Nama : Dr.Justinus, Way

Jabatan : 15 Tahun

1.Nilai-nilai demokrasi apa saja yang Bapak/Ibu tekankan dalam pembelajaran PPKn di kelas?

Jawabaaan :

Toleranis,saling menghargai, kebebasan berpendapat,berpartisipasi, disiplin, bertanggung jawab

2.Apa metode atau model pembelajaran yang Bapak/Ibu gunakan untuk mengajarkan nilai-nilai demokrasi?

Jawabaaan :

Dengan menggunakan metode ceramah bervariasi

3.Apakah disekolah ini pendidikan demokrasi terimplementasikan dengan baik?

Jawabaaan :

Ya, sudah mencapai 80%

4.Menurut Bapak/Ibu, bagaimana respon siswa terhadap upaya implementasi nilai-nilai demokrasi dalam pembelajaran PPKn selama ini?

Jawabaaan :

Ya , respon siswa siswi sangat positif dan sangat bagus

5.Menurut Bapak/Ibu, mengapa penting untuk mengimplementasikan nilai-nilai demokrasi dalam pembelajaran PPKn di tingkat SMP?

Jawabaaan :

Ya sangat penting karena di SMP adalah masa pembentukan karakter siswa dan melatih siswa dan ketrampilan dalam demokrasi

6.Apa saja faktor pendukung yang Bapak/Ibu hadapi dalam mengimplementasikan nilai-nilai demokrasi dalam pembelajaran PPKn di SMP Usdatara Kota Sorong?

Jawaban :

Saya sendiri sebagai guru PPKn, kemudian ada sarana dan prasarana sebagai pendukung

7. Apa saja faktor penghambat yang Bapak/Ibu hadapi dalam mengimplementasikan nilai-nilai demokrasi dalam pembelajaran PPKn di SMP Usdatara Kota Sorong?

Jawaban :

Yang menjadi faktor penghambat implementasi nilai-nilai demokrasi dalam proses pembelajaran PPKn yaitu perbedaan individual yang dimana setiap siswa-siswi memiliki kepekaan cukup tinggi, namun ada juga Sebagian siswa yang memang agak lambat dan ada siswa yang mau di atur dan ada yang juga susah di atur

8. Sebagai Guru PPKn bagaimana Upaya yang anda lakukan dalam proses penanaman nilai-nilai demokrasi pada siswa?

Jawaban :

Sebagai guru PPKn, saya berusaha menanamkan demokrasi kepada siswa melalui teori dan praktik dalam proses pembelajaran, Misalnya, agar siswa terbiasa menyampaikan pendapat, mendengarkan orang lain, dan berkolaborasi dalam pengambilan keputusan, saya sering mengatur diskusi kelompok, debat, dan musyawarah di kelas.

9. Apakah ada media pembelajaran yang menjadi penunjang dalam proses Implementasi nilai-nilai demokrasi?

Jawaban :

Dalam proses pembelajaran saya selalu menggunakan media pembelajaran seperti Buku Paket pelajaran PPKn, gambar, foto, bagan struktur pemerintahan, LKS, Laptop, dan beberapa buku referensi sebagai penunjang pembelajaran

10. Bagaimana Implementasi nilai-nilai demokrasi dalam pembelajaran PPKn di sekolah ?

Jawaban:

Dengan menerapkan Nilai-nilai demokrasi di lingkungan sekolah, seperti diskusi kelompok, debat, musyawarah, toleransi dan menghargai

INSTRUMEN PENELITIAN

Lembar Instrumen Wawancara siswa

Nama : Yusuf Yotam Way

Kelas :VII (7)

1. Dalam pelajaran PPKn, apa yang Anda ketahui tentang nilai-nilai demokrasi?

Jawaban:

Menghormati pendapat orang lain: "Kalau demokrasi itu kita harus mendengarkan pendapat teman, walaupun berbeda dengan pendapat kita."

2. Apa saja nilai-nilai demokrasi yang pernah diajarkan dalam pelajaran PPKn yang ingat Anda?

Jawaban :

Kalau di sekolah Demokrasi di sekolah termasuk pemilihan ketua kelas.

3. Apakah kamu merasa guru memberikan kesempatan bagi siswa untuk berpendapat dan berdiskusi dalam kelas?

Jawaban:

Iya, guru sering memberi kesempatan kami untuk bertanya dan menyampaikan pendapat di kelas.

4. Bagaimana Guru PPKn mendorong kamu untuk menghargai pendapat teman ?

Jawaban:

Guru sering mengingatkan bahwa saling menghormati adalah hak setiap orang untuk berbicara.

5. Bagaimana kamu dan teman-teman menerapkan nilai demokrasi dalam kehidupan sehari-hari di sekolah?

Jawaban :

Kami menerapkan demokrasi dengan memilih ketua kelas.
Kami sepakat untuk membagi peran jika ada tugas kelompok.

6. Apakah ada kendala atau tantangan dalam menerapkan nilai-nilai demokrasi di sekolah?

Jawaban:

“Tidak ada”

7. Di mana kamu melihat penerapan nilai demokrasi di sekolah?

Jawaban:

“Waktu diskusi kelompok, semua anggota diberi kesempatan bicara.”

8. Apakah Anda merasa bahwa setiap siswa diperlakukan sama dan memiliki hak yang sama untuk berbicara di kelas PPKn, tanpa memandang latar belakang atau kemampuan?

Jawaban:

Menurut saya, tidak ada perbedaan perlakuan antara siswa laki-laki dan perempuan, semua sama.”

9. Contoh kegiatan di kelas atau di sekolah yang menurutmu mencerminkan nilai-nilai demokrasi itu seperti apa?

Jawaban:

Menurut saya, contoh demokrasi di sekolah adalah saat siswa memilih ketua kelas atau ketua OSIS melalui voting.

10. Apakah ada kegiatan di luar kelas PPKn (misalnya di OSIS atau kegiatan ekstrakurikuler) yang menurut Anda juga mengajarkan nilai-nilai demokrasi? Bisa berikan contohnya?

Jawaban :

“Waktu pemilihan ketua OSIS, itu contoh demokrasi karena semua siswa ikut memilih.”

11. Apakah seluruh siswa dilibatkan dalam setiap kegiatan yang diadakan di sekolah maupun diluar sekolah ini?

Jawaban:

Memang, sebagian besar siswa terlibat dalam kegiatan sekolah, tetapi ada juga yang hanya diikuti oleh siswa yang terpilih atau berminat.

12. Bagaimana proses pembelajaran PPKn di kelasmu apakah kamu sering belajar secara berkelompok?

Jawaban :

Guru kadang-kadang meminta kami berdiskusi dalam kelompok dan kemudian mempresentasikan temuan tersebut di depan kelas.

13. Menurut kamu dalam pembelajaran PPKn apakah guru telah melaksanakan dan mengamalkan nilai-nilai demokrasi ?

Jawaban :

"Iya, menurut saya guru PPKn telah menerapkan prinsip demokrasi karena memberi kesempatan kepada semua siswa untuk berbicara."

14. Metode Pembelajaran apakah yang guru sering gunakan dalam proses pembelajaran PPKn?

Jawabaaan :

Dalam proses belajar mengajar Guru PPKn menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi seperti metode ceramah, tanya jawab, diskusi, penugasan baik secara individu maupun berkelompok, presentasi. Guru biasanya menjelaskan terlebih dahulu mengenai materi pembelajaran kemudian melakukan tanya jawab jika semua siswa sudah paham terkait materi yang diberikan, dan selanjutnya guru memberikan tugas yang dimana tugas itu dikerjakan secara mandiri maupun kelompok"

Nama : Melati

Kelas : VII(7)

1. Dalam pelajaran PPKn, apa yang Anda ketahui tentang nilai-nilai demokrasi?

Jawaban :

Toleransi, kebebasan berpendapat, saling menghormati , disiplin, bertanggung jawab

2. Apa saja nilai-nilai demokrasi yang pernah diajarkan dalam pelajaran PPKn yang ingat Anda?

Jawaban :

Menghargai pendapat teman lain dan toleransi

3. Apakah kamu merasa guru memberikan kesempatan bagi siswa untuk berpendapat dan berdiskusi dalam kelas?

Jawaban :

Ya, guru sering memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan pendapat dalam diskusi

4. Bagaimana Guru PPKn mendorong kamu untuk menghargai pendapat teman ?

Jawaban :

Yaitu mengingatkan kita agar tidak tertawa pendapat teman

5. Bagaimana kamu dan teman-teman menerapkan nilai demokrasi dalam kehidupan sehari-hari di sekolah?

Jawaban :

Yaitu bekerja sama dalam kelompok dan saling menghargai pendapat

6. Apakah ada kendala atau tantangan dalam menerapkan nilai-nilai demokrasi di sekolah?

Jawaban :

Ya , kadang ada siswa yang kurang aktif dalam diskusi

7.Di mana kamu melihat penerapan nilai demokrasi di sekolah?

Jawabaaan :

Saat di dalam kelas sebelum memulai pembelajaran saya dan teman-teman beserta guru mata pelajaran mengawalinya dengan doa , dan saat dalam berdoa kami masing-masing berdoa menurut agama dan kepercayaan kami masing-masing dan jika ada teman dalam keadaan berdoa kami tidak ada yang mengganggu.

8.Apakah Anda merasa bahwa setiap siswa diperlakukan sama dan memiliki hak yang sama untuk berbicara di kelas PPKn, tanpa memandang latar belakang atau kemampuan?

Jawabaaan :

Sebagian besar iya , guru memberikan kesempatan yang sama

9.Contoh kegiatan di kelas atau di sekolah yang menurutmu mencerminkan nilai-nilai demokrasi itu seperti apa?

Jawabaa :

Yaitu pemilihan ketua kelas , serta dimana disiplin datang tepat waktu ke sekolah

10.Apakah ada kegiatan di luar kelas PPKn (misalnya di OSIS atau kegiatan ekstrakurikuler) yang menurut Anda juga mengajarkan nilai-nilai demokrasi? Bisa berikan contohnya?

Jawabaaan :

Kerja sama dalam lomba sekolah ataupun pramuka

11.Apakah seluruh siswa dilibatkan dalam setiap kegiatan yang diadakan di sekolah maupun diluar sekolah ini?

Jawabaaan:

Dikuti sertakan semua siswa tapi dipilih atau mengikuti seleksi

12. Bagaimana proses pembelajaran PPKn di kelasmu apakah kamu sering belajar secara berkelompok?

Jawaban :

Ya, sering ada kerja kelompok dan diskusi untuk membahas materi

13. Menurut kamu dalam pembelajaran PPKn apakah guru telah melaksanakan dan mengamalkan nilai-nilai demokrasi ?

Jawaban :

Ya , guru sudah melaksanakan dan mengamalkan nilai-nilai demokrasi dengan baik

14. Metode Pembelajaran apakah yang guru sering gunakan dalam proses pembelajaran PPKn?

Jawaban :

Diskusi kelompok, tanya jawab, penugasan, presentasi dan kadang-kadang ceramah singkat

Nama : Veralita Shartian

Kelas : VIII(8)

1. Dalam pelajaran PPKn, apa yang Anda ketahui tentang nilai-nilai demokrasi?

Jawaban :

Nilai demokrasi adalah nilai yang menghargai perbedaan pendapat

2. Apa saja nilai-nilai demokrasi yang pernah diajarkan dalam pelajaran PPKn yang ingat Anda?

Jawaban:

Toleransi , saling menghormati, terbuka dalam berbicara / berkomunikasi

3. Apakah kamu merasa guru memberikan kesempatan bagi siswa untuk berpendapat dan berdiskusi dalam kelas?

Jawaban:

Ya , guru memberikan kesempatan kepada semua dengan cara guru bertanya jawab, diskusi , atau minta siswa dalam menyampaikan pendapat di depan kelas

4. Bagaimana Guru PPKn mendorong kamu untuk menghargai pendapat teman ?

Jawaban :

Setiap pendapat teman harus didengar , tidak boleh mengejek dan semua siswa diberi kesempatan berbicara

5. Bagaimana kamu dan teman-teman menerapkan nilai demokrasi dalam kehidupan sehari-hari di sekolah?

Jawaban:

Bermusyawarah bersama dalam menentukan atau membagi tugas piket kelas serta membagi tugas kelompok secara adil

6. Apakah ada kendala atau tantangan dalam menerapkan nilai-nilai demokrasi di sekolah?

Jawaban :

Tidak ada

7. Di mana kamu melihat penerapan nilai demokrasi di sekolah?

Jawaban :

Pemilihan ketua kelas , atau diskusi kelompok

8. Apakah Anda merasa bahwa setiap siswa diperlakukan sama dan memiliki hak yang sama untuk berbicara di kelas PPKn, tanpa memandang latar belakang atau kemampuan?

Jawabaa :

Ya, diperlakukan sama

9. Contoh kegiatan di kelas atau di sekolah yang menurutmu mencerminkan nilai-nilai demokrasi itu seperti apa?

Jawabaaan :

Pembagian tugas piket menjadi petugas upacara bendera setiap hari senin, serta pemilihan ketua, wakil, sekretaris dan bendahara kelas

10. Apakah ada kegiatan di luar kelas PPKn (misalnya di OSIS atau kegiatan ekstrakurikuler) yang menurut Anda juga mengajarkan nilai-nilai demokrasi? Bisa berikan contohnya?

Jawaban :

Ya , misalnya rapat OSIS

11. Apakah seluruh siswa dilibatkan dalam setiap kegiatan yang diadakan di sekolah maupun diluar sekolah ini?

Jawabaaan :

Biasanya iya semua siswa dilibatkan

12. Bagaimana proses pembelajaran PPKn di kelasmu apakah kamu sering belajar secara berkelompok?

Jawabaaan :

Ya, sering belajar kelompok

13. Menurut kamu dalam pembelajaran PPKn apakah guru telah melaksanakan dan mengamalkan nilai-nilai demokrasi ?

Jawabaaan :

Menurut saya guru PPKn dalam proses belajar mengajar sudah melaksanakan dan mengamalkan nilai-nilai demokrasi, karena dalam pembelajarannya guru bersifat terbuka dan selalu memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya mengenai materi yang

kurang dipahami atau dimengerti oleh siswa serta kami juga diberikan kesempatan oleh guru untuk berdiskusi atau menyelesaikan tugas yang diberikan

14. Metode Pembelajaran apakah yang guru sering gunakan dalam proses pembelajaran PPKn?

Jawaban :

Ceramah , tanya jawab, penugasan pribadi maupun kelompok dan presetansi

Nama : Seli Kornelia Pomsaro

Kelas : VIII(8)

1. Dalam pelajaran PPKn, apa yang Anda ketahui tentang nilai-nilai demokrasi?

Jawaban :

Nilai demokrasi adalah Menjunjung tinggi tolransi, kebebasan berpendapat, partisipasi , saling menghargai

2. Apa saja nilai-nilai demokrasi yang pernah diajarkan dalam pelajaran PPKn yang ingat Anda?

Jawaban:

Menghargai perbedaan , disiplin dan bertanggung jawab

3. Apakah kamu merasa guru memberikan kesempatan bagi siswa untuk berpendapat dan berdiskusi dalam kelas?

Jawaban :

Iya guru sangat memberikan kesempatan

4. Bagaimana Guru PPKn mendorong kamu untuk menghargai pendapat teman ?

Jawaban :

Yaitu mendengarkan pendapat teman sesama secara sopan dan tanggapinya pendapatnya dengan baik

5. Bagaimana kamu dan teman-teman menerapkan nilai demokrasi dalam kehidupan sehari-hari di sekolah?

Jawaban :

Yaitu berbagai tugas saat bekerja kelompok bukan hanya itu saja tetapi juga membagi tugas piket kelas juga

6. Apakah ada kendala atau tantangan dalam menerapkan nilai-nilai demokrasi di sekolah?

Jawaban :

Ada , misalnya masih ada teman yang kurang berani dalam menyampaikan pendapat di kelas

7. Di mana kamu melihat penerapan nilai demokrasi di sekolah?

Jawaban :

Saat rapat untuk kegiatan kelas ataupun pemilihan ketua OSIS

8. Apakah Anda merasa bahwa setiap siswa diperlakukan sama dan memiliki hak yang sama untuk berbicara di kelas PPKn, tanpa memandang latar belakang atau kemampuan?

Jawaban :

Ya , setiap siswa diberikan kesempatan yang sama

9. Contoh kegiatan di kelas atau di sekolah yang menurutmu mencerminkan nilai-nilai demokrasi itu seperti apa?

Jawaban :

Menentukan jadwal piket kelas , atau jadwal piket upacara bendera setiap hari senin

10. Apakah ada kegiatan di luar kelas PPKn (misalnya di OSIS atau kegiatan ekstrakurikuler) yang menurut Anda juga mengajarkan nilai-nilai demokrasi? Bisa berikan contohnya?

Jawabaaan :

Rapat Osis

11. Apakah seluruh siswa dilibatkan dalam setiap kegiatan yang diadakan di sekolah maupun diluar sekolah ini?

Jawabaaan :

Ya, kami seluruh siswa dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah baik di dalam maupun di luar sekolah, misalnya, setiap hari senin kami melakukan upacara bendera yang dimana kami sudah dibagikan jadwal piket setiap hari senin yang menjadi petugas upacara adalah kelas VII minggu pertama , nanti minggu ke dua dan seterusnya kelas VIII dan IX terus bergantian.

12. Bagaimana proses pembelajaran PPKn di kelasmu apakah kamu sering belajar secara berkelompok?

Jawabaaan :

Ya, sering

13. Menurut kamu dalam pembelajaran PPKn apakah guru telah melaksanakan dan mengamalkan nilai-nilai demokrasi ?

Jawabaaan :

Ya, guru sudah menerapkan

14. Metode Pembelajaran apakah yang guru sering gunakan dalam proses pembelajaran PPKn?

Jawabaaan :

Metode ceramah , diskusi , tanya jawab, presentasi dan penugasan

Nama : Ayu Getina Nahbial

Kelas : IX(9)

1. Dalam pelajaran PPKn, apa yang Anda ketahui tentang nilai-nilai demokrasi?

Jawabaaan :

Nilai demokrasi bicara tentang kebebasan yang bertanggung jawab, dimana setiap orang punya hak yang sama untuk berpendapat dan Keputusan yang diambil

2. Apa saja nilai-nilai demokrasi yang pernah diajarkan dalam pelajaran PPKn yang ingat Anda?

Jawabaaan :

Toleransi , menghargai perbedaan pendapat , saling menghargai, kebersamaan, tanggung jawab, disiplin

3. Apakah kamu merasa guru memberikan kesempatan bagi siswa untuk berpendapat dan berdiskusi dalam kelas?

Jawabaaan:

Ya , guru memberikan kesempatan kepada semua siswa

4. Bagaimana Guru PPKn mendorong kamu untuk menghargai pendapat teman ?

Jawabaaan :

Guru selalu mengingatkan belajar mendengarkan pendapat orang lain tanpa memotong pembicaraan

5. Bagaimana kamu dan teman-teman menerapkan nilai demokrasi dalam kehidupan sehari-hari di sekolah?

Jawabaa :

Ya dengan cara menentukan jadwal piket bersama , memilih ketua kelompok secara voting

6. Apakah ada kendala atau tantangan dalam menerapkan nilai-nilai demokrasi di sekolah?

Jawaban :

Ada kadang masih ada teman yang tidak mau menerima hasil musyawara, atau ada yang tidak mau ikut berpartisipasi

7. Di mana kamu melihat penerapan nilai demokrasi di sekolah?

Jawaban :

Saat pemilihan pengurus OSIS, Pemilihan ketua kelas, rapat kelas, dan pada saat diskusi kelompok saat pembelajaran

8. Apakah Anda merasa bahwa setiap siswa diperlakukan sama dan memiliki hak yang sama untuk berbicara di kelas PPKn, tanpa memandang latar belakang atau kemampuan?

Jawaban :

Ya , guru memberikan kesempatan pada semua siswa

9. Contoh kegiatan di kelas atau di sekolah yang menurutmu mencerminkan nilai-nilai demokrasi itu seperti apa?

Jawaban :

Saat pembagian tugas kelompok berdasarkan hasil kesepakatan antara guru dan siswa

10. Apakah ada kegiatan di luar kelas PPKn (misalnya di OSIS atau kegiatan ekstrakurikuler) yang menurut Anda juga mengajarkan nilai-nilai demokrasi? Bisa berikan contohnya?

Jawaban:

ada dimana saat setiap hari jumat kami seluruh siswa siswi dan guru melaksana ibadah osis setiap hari jumat

11. Apakah sluruh siswa dilibatkan dalam setiap kegiatan yang diadakan di sekolah maupun diluar sekolah ini?

Jawabaaan:

Tidak semua siswa , tapi biasanya yag ingin ikut akan diberikan kesempatan

12. Bagaimana proses pembelajaran PPKn di kelasmu apakah kamu sering belajar secara berkelompok?

Jawabaaan:

Ya , sering belajar kelompok

13. Menurut kamu dalam pembelajaran PPkn apakah guru telah melaksanakan dan mengamalkan nilai-nilai demokrasi ?

Jawabaaan :

Sudah , karena guru selalu meghargai pendapat murid , tidak pilih kasih , dan mendidik kami untuk menghargai perbedaan

14. Metode Pembelajaran apakah yang guru sering gunakan dalam proses pembelajaran PPKn?

Jawabaaan :

Dalam proses pembelajaran guru PPKn menggunakan metode pembelajara yang bervariasi seperti metode ceramah, tanya jawab, diskusi, penugasaan baik secara individual maupun kelompok, dan Presentasi

Nama : Selly Febbriana Makmur

Kelas : XI(9)

1. Dalam pelajaran PPKn, apa yang Anda ketahui tentang nilai-nilai demokrasi?

Jawaban :

Menurut saya nilai demokrasi adalah tentang kebebasan berpendapat, menghargai perbedaan, dan adanya keadilan dalam mengambil keputusan

2. Apa saja nilai-nilai demokrasi yang pernah diajarkan dalam pelajaran PPKn yang ingat Anda?

Jawaban :

Saya ingat guru pernah mengajarkan tentang keterbukaan, tanggung jawab, menghormati hak orang lain serta ikut dalam pengambilan Keputusan bersama

3. Apakah kamu merasa guru memberikan kesempatan bagi siswa untuk berpendapat dan berdiskusi dalam kelas?

Jawaban :

Ya , guru memberikan kesempatan kami untuk berbicara dan mengajukan pendapat meskipun berbeda

4. Bagaimana Guru PPKn mendorong kamu untuk menghargai pendapat teman ?

Jawaban :

Setiap pendapat itu penting dan kalau ada teman bicara kita harus mendengarkan dulu , tanpa memotong, nanti lama-lama kami terbiasa menghargai

5. Bagaimana kamu dan teman-teman menerapkan nilai demokrasi dalam kehidupan sehari-hari di sekolah?

Jawaban :

Kami menerapkan demokrasi misalnya waktu pilih ketua kelas , semua siswa ikut memilih, tidak ada paksaan, atau kalau ada tugas kelompok kami berbagai peran dengan musyawarah

6. Apakah ada kendala atau tantangan dalam menerapkan nilai-nilai demokrasi di sekolah?

Jawaban :

Kadang ada teman yang malu bicara , itu yang membuat sehingga penerapan demokrasi agak susah

7.Di mana kamu melihat penerapan nilai demokrasi di sekolah?

Jawaban:

Ya saat pemilihan ketua OSIS

8.Apakah Anda merasa bahwa setiap siswa diperlakukan sama dan memiliki hak yang sama untuk berbicara di kelas PPKn, tanpa memandang latar belakang atau kemampuan?

Jawaban :

Menurut saya cukup adil,guru selalu kasih kesempatan secara bergilir , jadi siswa yang pendiam juga diminta menyampaikan pendapat tidak hanya yang aktif saja

9.Contoh kegiatan di kelas atau di sekolah yang menurutmu mencerminkan nilai-nilai demokrasi itu seperti apa?

Jawaban ;

Saat diskusi kelompok

10.Apakah ada kegiatan di luar kelas PPKn (misalnya di OSIS atau kegiatan ekstrakurikuler) yang menurut Anda juga mengajarkan nilai-nilai demokrasi? Bisa berikan contohnya?

Jawaban :

Iya , diluar kelas ada misalnya di OSIS saat rapat program kerja, semua anggota bisa memberikan masukan atau ide

11.Apakah seluruh siswa dilibatkan dalam setiap kegiatan yang diadakan di sekolah maupun diluar sekolah ini?

Jawaban :

Ya seluruh siswa dilibatkan, namun di seleksi dan siapa-siapa yang ingin berpartisipasi

12. Bagaimana proses pembelajaran PPKn di kelasmu apakah kamu sering belajar secara berkelompok?

Jawaban :

Belajarnya sering berkelompok ,jadi kami bisa berdiskusi , tapi kadang juga individu kalau materi tertentu

13. Menurut kamu dalam pembelajaran PPKn apakah guru telah melaksanakan dan mengamalkan nilai-nilai demokrasi ?

Jawaban :

Menurut saya guru sudah mengamalkan nilai-nilai demokrasi

14. Metode Pembelajaran apakah yang guru sering gunakan dalam proses pembelajaran PPKn?

Jawaban :

Metode ceramah, penugasan , tanya jawab, diskusi kelompok dan presentasi kadang juga debat antar kelompok

Lampiran 2

INSTRUMEN PENELITIAN LEMBAR OBSERVASI IMPLEMENTASI NILAI-NILAI
DEMOKRASI DALAM PEMBELAJARAN PENDIDIDIKAN PANCASILA DAN
KEWARGANEGARAAN di SMP USDATARA KOTA SORONG

Lembar observasi Guru

Nama Guru : Dr.Justinus,Way

Kelas : VII,VIII,XI.

Hari/Tanggal : 22 Juli 2025

No	Aspek Yang Diamati	Penilaian	
		Ya	Tdk
1	Guru memberi kebebasan kepada siswa untuk bertanya	P	
2	Guru memberi kebebasan kepada setiap siswa untuk mengeluarkan pendapatnya	P	
3	Guru memberi kebebasan kepada siswa untuk berdiskusi dan menyelesaikan permasalahan yang diberikan	P	
4	Guru memberi kebebasan kepada seluruh anggota kelompok untuk berpartisipasi dalam diskusi	P	
5	Guru memberi kebebasan kepada siswa untuk membentuk kelompok sendiri	P	
6	Guru memberi kebebasan kepada siswa untuk	P	

	mencari materi dari berbagai sumber		
7	Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk berfikir sebelum menjawab pertanyaan yang diberikan	P	

INSTRUMEN PENELITIAN LEMBAR OBSERVASI IMPLEMENTASI NILAI-NILAI
DEMOKRASI DALAM PEMBELAJARAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN
KEWARGANEGARAAN di SMP USDATARA KOTA SORONG

Lembar Observasi Siswa

Nama : Yusuf Yotam Way

Kelas : VII

Hari/Tanggal : 16 juli 2025

No	Aspek Yang Diamati	Penilaian	
		Ya	Tidak
1	Siswa memberi kesempatan kepada siswa lain untuk mengemukakan pendapatnya	P	
2	Siswa member kesempatan kepada siswa lain untuk bertanya	P	
3	Siswa memberi kesempatan kepada siswa lain untuk melaksanakan tugas masing-masing dalam diskusi kelompok	P	
4	Siswa menghargai pendapat siswa lain	P	
5	Siswa mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam mengatasi perbedaan pendapat dalam diskusi	P	
6	Siswa memberikan kesempatan kepada kelompok lain untuk menyampaikan hasil diskusi kelompoknya	P	
7	Siswa menghargai perbedaan pendapat kelompok lain yang berbeda pendapat dengan kelompoknya	P	

INSTRUMEN PENELITIAN LEMBAR OBSERVASI IMPLEMENTASI NILAI-NILAI
DEMOKRASI DALAM PEMBELAJARAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN
KEWARGANEGARAAN di SMP USUDATARA KOTA SORONG

Lembar Observasi Siswa

Nama : Melani

Kelas : VII (3)

Hari/Tanggal : 16 Jan 2023

No	Aspek Yang Diamati	Penilaian	
		Ya	Tidak
1	Siswa memberi kesempatan kepada siswa lain untuk mengemukakan pendapatnya	✓	
2	Siswa member kesempatan kepada siswa lain untuk bertanya	✓	
3	Siswa memberi kesempatan kepada siswa lain untuk melaksanakan tugas masing-masing dalam diskusi kelompok	✓	
4	Siswa menghargai pendapat siswa lain	✓	

Dipindai dengan CamScanner

5	Siswa mengemukakan pendapat dan pendapat dalam mengartikan perbedaan pendapat dalam diskusi	✓	
6	Siswa memberikan kesempatan kepada kelompok lain untuk mengemukakan hasil diskusi kelompoknya	✓	
7	Siswa menghargai perbedaan pendapat kelompok lain yang berbeda pendapat dengan kelompoknya	✓	

Dipindai dengan CamScanner

INSTRUMEN PENELITIAN LEMBAR OBSERVASI IMPLEMENTASI NILAI-NILAI
DEMOKRASI DALAM PEMBELAJARAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN
KEWARGANEGARAAN di SMP USDATARA KOTA SORONG

Lembar Observasi Siswa

Nama : Reinhard Davon

Kelas : VII

Hari/Tanggal : 16 Juni 2025

No	Aspek Yang Diamati	Penilaian	
		Ya	Tidak
1	Siswa memberi kesempatan kepada siswa lain untuk mengemukakan pendapatnya	✓	
2	Siswa member kesempatan kepada siswa lain untuk bertanya	✓	
3	Siswa memberi kesempatan kepada siswa lain untuk melaksanakan tugas masing-masing dalam diskusi kelompok	✓	
4	Siswa menghargai pendapat siswa lain	✓	
5	Siswa mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam mengatasi perbedaan pendapat dalam diskusi	✓	
6	Siswa memberikan kesempatan kepada kelompok lain untuk menyampaikan hasil diskusi kelompoknya	✓	
7	Siswa menghargai perbedaan pendapat kelompok lain yang berbeda pendapat dengan kelompoknya	✓	

INSTRUMEN PENELITIAN LEMBAR OBSERVASI IMPLEMENTASI NILAI-NILAI
DEMOKRASI DALAM PEMBELAJARAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN
KEWARGANEGARAAN di SMP USDATARA KOTA SORONG

Lembar Observasi Siswa

Nama : *Seuna Karduna Pom Saru*

Kelas : *VIII*

Hari/Tanggal : *16 Juli 2025*

No	Aspek Yang Diamati	Penilaian	
		Ya	Tidak
1	Siswa memberi kesempatan kepada siswa lain untuk mengemukakan pendapatnya	<i>/</i>	
2	Siswa member kesempatan kepada siswa lain untuk bertanya	<i>/</i>	
3	Siswa memberi kesempatan kepada siswa lain untuk melaksanakan tugas masing-masing dalam diskusi kelompok	<i>/</i>	
4	Siswa menghargai pendapat siswa lain	<i>/</i>	
5	Siswa mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam mengatasi perbedaan pendapat dalam diskusi	<i>/</i>	
6	Siswa memberikan kesempatan kepada kelompok lain untuk menyampaikan hasil diskusi kelompoknya	<i>/</i>	
7	Siswa menghargai perbedaan pendapat kelompok lain yang berbeda pendapat dengan kelompoknya	<i>/</i>	

INSTRUMEN PENELITIAN LEMBAR OBSERVASI IMPLEMENTASI NILAI-NILAI
DEMOKRASI DALAM PEMBELAJARAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN
KEWARGANEGARAAN di SMP USDATARA KOTA SORONG

Lembar Observasi Siswa kelas VIII

Nama : Verita Siantan

Kelas : VIII

Hari/Tanggal : 16 Juli 2025

No	Aspek Yang Diamati	Penilaian	
		Ya	Tidak
1	Siswa memberi kesempatan kepada siswa lain untuk mengemukakan pendapatnya	/a	
2	Siswa member kesempatan kepada siswa lain untuk bertanya	/a	
3	Siswa memberi kesempatan kepada siswa lain untuk melaksanakan tugas masing-masing dalam diskusi kelompok	/a	
4	Siswa menghargai pendapat siswa lain	/a	
5	Siswa mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam mengatasi perbedaan pendapat dalam diskusi	/a	
6	Siswa memberikan kesempatan kepada kelompok lain untuk menyampaikan hasil diskusi kelompoknya	/a	
7	Siswa menghargai perbedaan pendapat kelompok lain yang berbeda pendapat dengan kelompoknya	/a	

INSTRUMEN PENELITIAN LEMBAR OBSERVASI IMPLEMENTASI NILAI-NILAI
DEMOKRASI DALAM PEMBELAJARAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN
KEWARGANEGARAAN di SMP USDATARA KOTA SORONG

Lembar Observasi Siswa

Nama : Seuy Febrina Matmur

Kelas : IX

Hari/Tanggal : 15 Juli 2025

No	Aspek Yang Diamati	Penilaian	
		Ya	Tidak
1	Siswa memberi kesempatan kepada siswa lain untuk mengemukakan pendapatnya	<u>/</u>	
2	Siswa member kesempatan kepada siswa lain untuk bertanya	<u>/</u>	
3	Siswa memberi kesempatan kepada siswa lain untuk melaksanakan tugas masing-masing dalam diskusi kelompok	<u>/</u>	
4	Siswa menghargai pendapat siswa lain	<u>/</u>	
5	Siswa mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam mengatasi perbedaan pendapat dalam diskusi	<u>/</u>	
6	Siswa memberikan kesempatan kepada kelompok lain untuk menyampaikan hasil diskusi kelompoknya	<u>/</u>	
7	Siswa menghargai perbedaan pendapat kelompok lain yang berbeda pendapat dengan kelompoknya	<u>/</u>	

INSTRUMEN PENELITIAN LEMBAR OBSERVASI IMPLEMENTASI NILAI-NILAI
DEMOKRASI DALAM PEMBELAJARAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN
KEWARGANEGARAAN di SMP USDATARA KOTA SORONG

Lembar Observasi Siswa

Nama : Ayu G. Tina Mahabiau

Kelas : IX

Hari/Tanggal : 15 Juli 2025

No	Aspek Yang Diamati	Penilaian	
		Ya	Tidak
1	Siswa memberi kesempatan kepada siswa lain untuk mengemukakan pendapatnya	✓	
2	Siswa member kesempatan kepada siswa lain untuk bertanya	✓	
3	Siswa memberi kesempatan kepada siswa lain untuk melaksanakan tugas masing-masing dalam diskusi kelompok	✓	
4	Siswa menghargai pendapat siswa lain	✓	
5	Siswa mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam mengatasi perbedaan pendapat dalam diskusi	✓	
6	Siswa memberikan kesempatan kepada kelompok lain untuk menyampaikan hasil diskusi kelompoknya	✓	
7	Siswa menghargai perbedaan pendapat kelompok lain yang berbeda pendapat dengan kelompoknya	✓	

Lampiran 3 Dokumentasi



Dokumentasi bersama kepala sekolah

Dokumentasi bersama Guru PPkn



Dokumentasi bersama siswa





Foto wawancara kelas VII



Foto wawancara bersama siswa kelas VIII



Foto wawancara bersama siswa IX

Lampiran (4) Lembar bimbingan Seminar Proposal 1



PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS PENDIDIKAN BAHASA, SOSIAL, DAN OLARAHAGA
UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH (UNIMUDA) SORONG
Officer: Jl. Kh. Ahmad Dahlan, Diklataryat Pantol, Alimra, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya

LEMBAR BIMBINGAN SUP
FAKULTAS PENDIDIKAN BAHASA, SOSIAL, DAN OLARAHAGA
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA & KEWARGANEGARAAN
ANGKATAN 2021 TAHUN AKADEMIK 2024/2025

NAMA : Ruce-Sangkek
 NIM : 140720521015
 JUDUL SKRIPSI : Implementasi Nilai-Nilai Demokrasi
Dalam Pembelajaran Pendidikan Pancasila
Dan Kewarganegaraan Di SMP Usdatama
Kota Sorong
 DOSEN PEMBIMBING I : Jusmin, S.Sos., M.E.C., Dev.

NO	TANGGAL	MATERI KONSULTASI	CATATAN REVISI	PARAF DOSEN
1	6/12/2024	BAB I, II, III		Jus
2	15/01/2025	BAB I, II, III		Jus
3	10/01/2025	BAB I, II, III		Jus
4				
5	10/02/2025	BAB I, II, III		Jus
6				
7	10/02/2025	BAB I, II, III		Jus
8				
9				
10				
11				
12				

Sorong,
 Dosen Pembimbing I

 Jusmin, S.Sos., M.E.C., Dev.
 NIP.


<https://pkn.unimudasorong.ac.id> PROGRAM STUDI:
 Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan,
 PGSD, Pendidikan Jasmani, dan PG PAUD

Dipindai dengan CamScanner

Lembar bimbingan Seminar Proposal 2

UNIMUDA
UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH (UNIMUDA) SORONG

LEMBAR BIMBINGAN SUP
FAKULTAS PENDIDIKAN BAHASA, SOSIAL, DAN OLARHAGA
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA & KEWARGANEGARAAN
ANGKATAN 2021 TAHUN AKADEMIK 2024/2025

NAMA : Ruce-Sangker
NIM : 140720521015
JUDUL SKRIPSI : Implementasi Nilai-Nilai Demokrasi
dalam Pembelajaran Pendidikan Pancasila
dan Kewarganegaraan di SMP
Uskharata Kota Sorong
DOSEN PEMBIMBING II : Dwi Septika, M.Pd.

NO	TANGGAL	MATERI KONSULTASI	CATATAN REVISI	PARAF DOSEN
1	19-02-2025	Perbaiki lampiran, perbaiki	Perbaiki skema, gambar	
2		Daftar isi, Daftar pustaka	Tidak representatif	
3		Pengantar, perbaiki cara pengutipan teori		
4		Perbaiki kutipan rumus, masalah dan kesimpulannya		
5		Perbaiki pembahasan penelitian, perbaiki cara pembuatan		
6		Perbaiki kesimpulan		
7	05/03/2025	Perbaiki latar belakang sesuai arahan - Perbaiki		
8		apa, tambahkan definisi operasional, perbaiki		
9		Daftar pustaka		
10	16/03/2025	Perbaiki definisi operasional, perbaiki bab definisi		
11		Perbaiki margin, perbaiki dan perbaiki		
12		Perbaiki hasil akhir		

07/03/2025 Acc SUP

Sorong,
Dosen Pembimbing II

SMART
Sistem Manajemen Riset Akademik

<https://pkn.unimudasorong.ac.id> PROGRAM STUDI

Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan,
PG PAUD

Lampiran (5) Lembar bimbingan Skripsi 1

		PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGERAAN FAKULTAS PENDIDIKAN BAHASA, SOSIAL, DAN OLARAHAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH (UNIMUDA) SORONG Officer : A. Rizki Alimad Dardani, Cilikurupi Parusi, Alimada, Kalsipukun Saung, Praput Barak Daryo	
		LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI	
		FAKULTAS PENDIDIKAN BAHASA, SOSIAL, DAN OLARAHAN	
		PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGERAAN	
		TAHUN AKADEMIK 2024/2025	
NAMA	RUCE - SAMBERE		
NIM	149320521015		
JUDUL SKRIPSI	IMPLEMENTASI NILAI-NILAI DEMOKRASI DALAM PEMBELAJARAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGERAAN DI SMP USATARA KOTA SORONG		
DOSEN PEMBIMBING I	MUSMIN, S.Sos.M.E.C.Dr.		

NO	TANGGAL	MATERI KONSULTASI	CATATAN REVISI	PARAF DOSEN
1.	07/02/2025	Bab VI dan V, dan analisis paku	- Ukuran huruf - Spasi dan cara penulisan	[Signature]
2.	15/08/2025		- Acc	[Signature]

Sorong,
Dosen Pembimbing I



https://pkn.unimudasorong.ac.id PROGRAM STUDI

Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan,
PGSD, Pendidikan Jurnalis, dan PG PAUD

Lembar bimbingan Skripsi 2


UNIMUDA
 104000

PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS PENDIDIKAN BAHASA, SOSIAL, DAN OLARAGA
UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH (UNIMUDA) SORONG
Officer: J. R.H. Ahmad Dahlan, D. Mulyadi Purnadi, Almar, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI
FAKULTAS PENDIDIKAN BAHASA, SOSIAL, DAN OLARAGA
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
TAHUN AKADEMIK 2024/2025

NAMA : RUCI, SANGKER
 NIM : 4032052105
 JUDUL SKRIPSI : IMPLEMENTASI NILAI-NILAI DEMOKRASI
DALAM PEMBELAJARAN PENDIDIKAN
PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
DI SMP USUPATARA KOTA SORONG
 DOSEN PEMBIMBING II : DWI SETIPANE, M.Pd

NO	TANGGAL	MATERI KONSULTASI	CATATAN REVISI	PARAF DOSEN
1.	09/08/2025	Revisi yang ditandai	BAB IV	
2.	10/08/2025	Daftar Pustaka	Langut ACC Ujian Skripsi	
3.				

Sorong,
 Dosen Pembimbing II


 Dwi Setipane, M.Pd.
 NIDNARIO-UNIMUDA SORONG

<https://pkn.unimudasorong.ac.id>

PROGRAM STUDI:
 Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan,
 PGSD, Pendidikan Jasmani, dan PG PAUD



CS Dipindai dengan CamScanner

Lampiran (6) Permohonan izin Penelitian



UNIMUDA
1999

FAKULTAS PENDIDIKAN BAHASA, SOSIAL, DAN OLARAHPIRA
UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH (UNIMUDA) SORONG
Offis: Jl. KH. A. Wahid Dahlan, 01 Kerlyat Pankal, Alimut, Kotapraja Sorong, Papua Barat Daya

Nomor : 260/1.3.AU/SPm/FABIO/B/2025 Sorong, 14 Juli 2025
 Lamp. : -
 Perihal : *Permohonan Izin Penelitian*

Kepada Yth.
 Kepala SMP Usdatara Kota Sorong
 Di _____
Tempat

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarokatuh.

Dekan Fakultas Pendidikan Bahasa, Sosial, dan Olahraga Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak/Ibu, kiranya dapat menerima dan mengizinkan mahasiswa kami:

Nama : Ruce Sangkek
 NIM : 148720521015
 Semester : VIII (Delapan)
 Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
 Judul Penelitian : "Implementasi Nilai-nilai Demokrasi dalam Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMP Usdatara Kota Sorong".

Untuk melaksanakan Penelitian Skripsi di instansi yang Bapak/Ibu pimpin. Pelaksanaan penelitian direncanakan mulai tanggal 15 - 31 Juli 2025.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarokatuh.

Dekan,

 Roni Andri Pramita, M.Pd.
 NIDN. 1411129001

Terselamatkan kepada:
 1. Ketua Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
 2. Dosen Pembimbing Skripsi
 3. Yang bersangkutan

www.fabio.unimudasorong.ac.id PROGRAM STUDI:
 Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan,
 PGSD, Pendidikan Jasmani, dan PG PAUD

FABIO-UNIMUDA SORONG
SMART
Berkas - Mandiri - Berkualitas - Berprestasi

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran (7) Surat Permohonan Dosen Expert Judgment

 **UNIMUDA**
SORS

PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS PENDIDIKAN BAHASA, SOSIAL, DAN OLIMPIKA
UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH (UNIMUDA) SORONG
Officer: Jl. KH. Ahmad Dahlan, 01 Marjani Pantai, Almas, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya

SURAT PERMOHONAN
DOSEN EXPERT JUDGMENT

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RUCI SANGKEK
Nim : 140720521015
Tempat tanggal Lahir : TOFOI, 20 APRIL 2003
Prodi : PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
Dosen Pembimbing : 1. JUSMIN, S.Sos. M.E.c.Dev
2. DWI SEPTIPANE, M.Pd.

Judul Skripsi :
IMPLEMENTASI NILAI-NILAI DEMOKRASI DALAM PEMBELAJARAN
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
DI SMP USDATARA KOTA SORONG

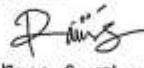
Dengan ini memohon untuk di berikan dosen *expert judgment* guna kelengkapan penelitian skripsi dengan instrumen penelitian sebagai berikut.

A. WAWANCARA
B. OBSERVASI
C. DOKUMENTASI

Dosen Pembimbing Validasi:

Nama : ERNANI RATUPANG, M.Pd.
Hombes : PPK

Almas, 9 Juni 2025
Pemohon.


RUCI SANGKEK
Nim. 140720521015
FABIO-UNIMUDA SORONG



<https://pkn.unimudasorong.ac.id> PROGRAM STUDI:

 Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan,
Pendidikan Islam, dan PG PAUD



Lamipran (8) Lembar Validasi

 **UNIMUDA**
SORONG

PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS PENDIDIKAN BAHASA, SOSIAL, UPAH DAN KEMASYARAKATAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH (UNIMUDA) SORONG
Officer: A. Kik, Ahmad Ochlan, Si Marlyat Panto, Almeda, Subrotohan Sorong, Yagun Sarat Deyo

LEMBAR VALIDASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ERNAWATI SIMATUPANG, M.Pd.**
NIP/NIDN : **1909099601**
Jabatan Fungsional : **KAPRODI**
Unit Kerja : **PPEH**

Menyatakan dengan sesungguhnya telah melakukan validasi Instrumen/produk mahasiswa:

Nama : **RUCB - SANGREK**
NIM : **148720521015**

Berupa :

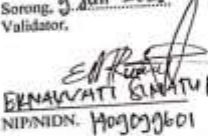
☐ Media pembelajaran
☐ Modul atau bahan ajar
☐ Model Pembelajaran
☒ Instrumen penelitian
☐ Lain-lain :

Dengan judul :

**IMPLEMENTASI NILAI-NILAI DEMOKRASI DALAM PEMBELAJARAN
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
DI SMP US DATATA KARA SORONG**

Keputusan hasil validasi adalah : **Sangat Baik/Baik/Cukup-Baik*)**
Demikianlah keterangan validitas ini dibuat sesuai dengan kaidah akademik dan keilmuan serta dapat di pertanggungjawabkan. Selanjutnya agar dapat dipergunakan sebagaimana seperlunya.

Sorong, 9 Juli 2025
Validator,


ERNAWATI SIMATUPANG, M.Pd.
NIP/NIDN. 1909099601

Mengetahui,
Ketua Prodi,


Ernawati Simatupang, M.Pd.
NIDN. 1409099601

Keterangan:
1) Beri tanda cek (v) pada kotak yang sesuai
2) Coret yang tidak perlu *)

 **FABIO-UNIMUDA SORONG**
SMART
Berprestasi • Berkualitas • Berinovasi • Berkeadilan • Berkeadilan

<https://pkn.unimudasorong.ac.id> PROGRAM STUDI:
Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan,
PGSD, Pendidikan Jasmani, dan PG PAUD

Lampiran (9) Surat keterangan penelitian dari sekolah



YAYASAN ANAK PAPUA CERDAS CERMAT
(YAPCC)
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA USDATARA
Alamat Sekolah : Jl. Asten Km. 3,0 Kelurahan Sawagumu Distrik Sorong Utara Kota

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor : 400.3.5/506/SMP-TSD/VII/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Sekolah SMP USDATARA menerangkan bahwa :

Nama	: Ruce Sangkek
NIM	: 148720521015
Semester	: VIII (Delapan)
Program Studi	: Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Telah selesai melakukan penelitian di SMP USDATARA Dengan Judul **"IMPLEMENTASI NILAI-NILAI DEMOKRASI DALAM PEMBELAJARAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN"** Di SMP USDATARA SORONG Dengan lama Penelitian 15 Juli 2025 s/d 31 Juli 2025

Demikian Surat Keterangan ini di buat untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Sorong, 31 Juli 2025
Kepala Sekolah,



GRACE TIMANG PASULU, SE
NIP. 197606062007012042



Dipindai dengan CamScanner

Lampiran 10 (Absen kelas VII,VIII,IX)

PEMERINTAH KOTA SORONG
SMK USDATARA
DAFTAR HADIR TAHUN PELAJARAN 2025 - 2026
B. Arteri KM 10

KELAS : VII
SEMESTER : I

MAPEL : I

LAKI - LAKI
PEREMPUAN

4
6

NO	NAMA SISWA	J	PERTEMUAN																														JUMLAH			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	B	I	A	
1	Audih Yuliana Klagitir	P																																		
2	Anriela L. V. Maran	P																																		
3	Amatus B. Prasetyo	L																																		
4	Carmel Kombado	P																																		
5	Jeferlin M. Kirwanto	P																																		
6	Melan	P																																		
7	Misa Dandi Asmanif	L																																		
8	Melani Kirana Putri	P																																		
9	Reinhan Dison	L																																		
10	Yusuf Yotam Way	L																																		
11																																				
12																																				
13																																				
14																																				
15																																				
16																																				
17																																				
18																																				
19																																				
20																																				
21																																				
22																																				
23																																				
24																																				
25																																				
26																																				
27																																				
28																																				
29																																				
30																																				

Dipindai dengan CamScanner

[illegible]

PEMERINTAH KOTA SORONG
SMP USDATARA
DAFTAR HADIR TAHUN PELAJARAN 2025 - 2026
Jl. Arteri KM.10

KELAS : IX
SEMESTER :

MAPEL :

LAKI - LAKI
PEREMPUAN

: 13
8

NO	NAMA SISWA		PERTEMUAN																																			JUMLAH		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	S	I	A				
1	Alberth Markus Toje	L																																						
2	Albertina Serkadifat	P																																						
3	Ayu G. Tina Nahabial	P																																						
4	Denis Sadrak Thesia	L																																						
5	Elhut Y. Pombaru	L																																						
6	Hendrikus Salosa	L																																						
7	Immanuel Juriges Beruat	L																																						
8	Immanuel V. R. Lahumeten	L																																						
9	Jensly E. Marisan	P																																						
10	Justin Hattu	L																																						
11	Karel Yesyan	L																																						
12	Linda Tangue	P																																						
13	Nikson Yewen	L																																						
14	Norman Yaam	L																																						
15	Rafa Alfian Asyam	L																																						
16	Riki H. K. Masakeri	L																																						
17	Selly Febrina Makmur	P																																						
18	Quins Way	L																																						
19	Theophilus Singer	L																																						
20	Domingus Ano Kambuaya	L																																						
21	Martina Silviana Sasa	P																																						
22	Andreas Asso	P																																						
23	Martina Wawilaka	P																																						
24	Pada Viki Sorya	L																																						
25	Papari Wondoloni	L																																						
26																																								
27																																								

RIWAYAT HIDUP



Ruce Sangkek. Dilahirkan di Tofoi, Kecamatan Sumuri, Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat pada tanggal 20 April 2003, dari pasangan Ayahanda Sakeus Sangkek dan Ibunda Dina Kambu. Penulis masuk Sekolah TK pada tahun 2008 di TK Bethesda Tofoi dan tamat tahun 2009, kemudian masuk SD YPPK Tofoi dan tamat tahun 2015, kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Usdatara Kota Sorong dan tamat tahun 2018, setelah lulus SMP Penulis melanjutkan pendidikan di

SMA N 1 Kediri Tabanan, Bali dan tamat tahun 2021. Pada tahun yang sama (2021), penulis melanjutkan pendidikan pada program studi Strata 1 (SI) Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Bahasa, Sosial dan Olahraga Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong (UNIMUDA)